77-942738

MARHAENISME

AZAS DAN TEORI PERDJUANGAN RAKJAT INDONESIA

HASIL

MUSJAWARAH LEMBAGA PEMBINA

MARHAENISME

TANGGAL 4 S/D 6 APRIL 1971

DI

BANDUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN

1. KATA PENGANTAR 1

2. PEMBUKAAN 4

3. BAB I. MARHAENISME, AZAS PERDJUANGAN RAKJAT INDONESIA ..... 7 — 11

4. BAB II. MARHAENISME SEBAGAI FAHAM KEMASJARAKATAN DAN FAHAM KENEGARAAN 12 — 17

5. BAB III. MARHAENISME SEBAGAI TEORI PERDJUANGAN ..... 18 — 24

6. BAB IV. MARHAENISME DIBIDANG POLITIK ..... 25 — 36

7. BAB V. MARHAENISME DIBIDANG EKONOMI ..... 37 — 51

8. BAB VI. MARHAENISME DIBIDANG SOSIAL ..... 52 — 58

9. BAB VII. MARHAENISME DIBIDANG KEBUDAJAAN 59 — 70

10. BAB VIII P.N.I. ALAT PERDJUANGAN RAKJAT INDONESIA ..... 70 — 84

11. MARHAEN INDONESIA 85

RALAT

hal. 7 baris ke 10 dari atas seharusnja dibatja :
Berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Esa.

hal 8 baris ke 13 seharusnja di batja : jaitu kejakinan hidup ke-Tuhanan

hal 13 baris ke 16 seharusnja di batja : berpri-kemanusiaan.

hal. 15 baris ke 24 seharusnja di batja :
Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kejakinan hidup bangsa Indonesia.

nal. 19 baris ke 6 seharusnja di batja : dan ke-adilan menurut Marhaenisme

hal. 35 baris ke 8 seharusnja di batja : Kewaspa-daan internasional.

hal. 40 baris ke 2 seharusnja di batja : Kontrak2 dengan perusahaan asing.

al. 43 baris ke 19 kiri seharusnja dibatja : Re pelita Tahap Kedua harus mendjamin.
ke 19 kanan seharusnja di batja : Berhu-bung dengan itu semua maka Rentjana Pem bangunan Lima Tahun Tahap Kedua jang akan dimulai th. 1974 perlu memuat djami-nan2 objektif untuk terselenggaranja pem-bangunan industri.

hal. 48 baris ke 8 seharusnja di batja : bagi usaha negara tentu sebaliknja.

hal. 57 baris ke 8 seharusnja di batja : pembukaan lapangan.

hal. 64 baris ke 9 seharusnja di batja : di bidang ekonomi. Karena itu

hal. 70 baris ke 15 seharusnja di batja : Pantjasila harus di djelmakan didalam bangunan2.

hal. 71 baris ke 1 dari atas seharusnja di batja : PNI didirikan pada tgl. 4 Djuli 1927 di Bandung. Nama semula.

hal. 72 baris ke 16 dari atas seharusnja di batja : Azas PNI.

ke 24 dari atas seharusnja di batja : di djadjah oleh Pemerintah Hindia Belanda.

hal. 73 baris ke 14 dari atas seharusnja di batja : dan mengobarkan.

hal. 77 baris ke 11 dari atas seharusnja di batja : itu perlu dibangunkan persatuan Bangsa2

hal. 80 baris ke 1 dari atas seharusnja di batja : Dalam anggaran dasar di tetapkan bahwa tudjuan PNI adalah berdjuang mentjapai kemerdekaan atas dasar kekuatan ..... dst.

hal. 80 baris ke 7 dari atas seharusnja di batja : Program PNI diwaktu itu menjimpulkan hal2

hal. 82 baris ke 7 dari atas seharusnja di batja : Pengobaran semangat.

KATA PENGANTAR

BERTEPATAN dengan mendekatnja pemilihan umum jang merupakan peristiwa penting bagi Rakjat didalam mendjalankan kedaulatannja, maka pada tanggal 4 sampai 6 April 1971 dikota Bandung tempat kelahiran PNI berkumpul dan bermusjawarah sedjumlah tokoh dan pemuka marhaenis dalam bentuk „Musjawarah Lembaga Pembina Marhaenisme". Terbina dan berkembanglah saling-mengerti jang baik diantara semua peserta. Tergalanglah rasa dan djiwa kesatuan dan persatuan diantara semua unsur Keluarga Besar PNI. Mendjadi lebih kokoh dan kuatlah modal dan dasar perdjuangan kaum marhaenis. Dan tumbuhlah harapan2 baru untuk mewudjudkan tjita2 Bangsa dan Rakjat Indonesia.

Dengan bahasa dan gaja jang berbeda, semua peserta menjatakan pengertian jang sama tentang Marhaenisme sebagai faham kenegaraan/kemasjarakatan dan sebagai teori perdjuangan serta konsekwensi pelaksanaannja diberbagai bidang. Musjawarah setjara bulat menjetudjui diterbitkannja naskah jang mendjelaskan arti dan pelaksanaan Marhaenisme. Musjawarah men dukung sepenuhnja usaha2 pembinaan dan pengembangan Marhaenisme dalam arti seluas2nja. Dan Musjawarah menghendaki supaja Lembaga

Pembina Marhaenisme berlaku djuga sebagai laboratorium penganalisaan dan pengolahan berbagai masalah teori dan praktek pertjaturan politik, baik jang bersifat nasional maupun jang bersifat internasional.

Setelah bersidang tiga hari tiga malam setjara terus-menerus Musjawarah Lembaga Pembina Marhaenisme berhasil menjusun suatu naskah jang berdjudul „Marhaenisme Azas dan Teori Perdjuangan Rakjat Indonesia" dengan memuat hal2 berikut :

1. Keterangan pokok tentang arti Marhaenisme.
2. Pendjelasan tentang konsepsi pelaksanaan Marhaenisme diberbagai bidang kehidupan.
3. Pernjataan pendirian politik mengenai beberapa masalah untuk diketahui oleh semua pihak.
4. Pemetjahan beberapa masalah terpenting jang dihadapi Bangsa dan Rakjat Indonesia.
5. Garis2 besar haluan PNI.
6. Pedoman perdjuangan bagi kader marhaenis.
7. Bahan diskusi dan bahan pendidikan politik bagi pimpinan PNI dan Ormas2nja disegala tingkat.

Dengan diterbitkannja risalah ini maka bertambahlah perbendaharaan kita dibidang ideologie dan konsepsi. Semoga risalah ini memperkokoh dan meningkatkan perdjuangan kita.

Djakarta, 15 April 1971.

An. Lembaga Pembina Marhaenisme,

(Usep Ranawidjaja)

P E M B U K A A N

MENGINSJAFI akan keperluan Bangsa dan Rakjat Indonesia untuk mendapat bimbingan, tuntutan dan pedoman didalam memelihara dan mengembangkan kepentingan hidupnja serta didalam perdjuangan mewudjudkan tjita2nja seperti tersimpul dalam Pantjasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kaum marhaenis wadjib untuk tampil kedepan dengan pendirian dan gagasannja;

Menjadari akan kewadjiban sedjarah PNI untuk menjelamatkan dan mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia, serta menjadari pula tanggung djawab mengenai nasib Rakjat jang menderita dan prihatin hingga kini, kaum marhaenis wadjib mendjelaskan pokok2 pendirian Marhaenisme sebagai faham kenegaraan-kemasjarakatan dan sebagai teori perdjuangan jang sedjalan dan sedjiwa dengan Pantjasila dasar negara Republik Indonesia dengan disertai konsepsi pelaksanaannja diberbagai bidang dalam garis besarnja guna didjadikan pedoman dan patokan bagi para penganut dan pendukungnja:

Dengan bersendikan kejakinan bahwa Tuhan Jang Maha Esa adalah Maha Pentjipta dan Maha Kuasa;

Dengan senantiasa mendjundjung tinggi hak dan kepentingan hidup Rakjat Indonesia sebagai

Bangsa jang bersatu dan berwilajah dari Sabang sampai Merauke dengan berwadahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945;

Dengan mentjita2kan terwudjudnja Kedaulatan Rakjat didalam tertib-masjarakat dan tertib-negara sebagai tata-tjara pergaulan hidup jang adil dan beradab;

Dengan mejakini bahwa kebenaran berada diatas segala kebatilan, dan bahwa keadilan berada diatas segala kedjahatan;

Maka dipersembahkanlah risalah jang berdjudul „Marhaenisme, Azas dan Teori Perdjuangan Rakjat Indonesia" kepada segenap Rakjat Indonesia, terutama Rakjat Marhaen jang masih menderita sebagai amal-bhakti dan sumbangsih kaum marhaenis jang tergabung dalam Keluarga Besar Partai Nasional Indonesia.

Bandung, 6 April 1971.

MUSJAWARAH LEMBAGA PEMBINA MARHAENISME

Pimpinan,

Ketua,

(Usep Ranawidjaja)

Sekretaris,

(H.A. Karundeng).

Mengetahui ;

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASIONAL INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Djendral I,

(Hadisubeno Sosrowerdojo)

BAB I.

MARHAENISME, AZAS PERDJUANGAN RAKJAT INDONESIA

Penderitaan dan perdjuangan Rakjat Indonesia.

Selama ber-abad2 Rakjat Indonesia menderita sengsara karena feodalisme, imperialisme dan kapitalisme, Rakjat Indonesia mendjadi melarat, serba kekurangan, dan tiga setengah abad terbelakang. Dan imperialisme mendjadikan Bangsa Indonesia terpetjah berkeping keping atas ratusan kelompok jang bisa diadudomba satu sama lain.

Berkat Rarhmat Tuhan Jang Maha Esa, pada permulaan abad 20 tumbuh kesadaran Rakjat, dan berkobar semangat untuk mengubah nasibnja. Mulailah usaha2 menjusun kekuatan. Berdjalanlah persiapan2 aksi politik. Dilantjarkanlah gerakan2 sebagai latihan politik. Maka tumbuh dan bergeloralah gerakan massa rakjat melawan pendjadjah. Dan perdjuangan kemerdekaan Rakjat Indonesia merupakan kenjataan sedjarah jang tak dapat dibendung lagi.

Hakekat perdjuangan Bangsa Indonesia dan nilai2 spirituilnja.

Hakekat perdjuangan Rakjat Indonesia adalah untuk menegakkan hak hidupnja sendiri dan sekali-

gus mengenjahkan imperialisme, kapitalisme dan feodalisme jang telah memperkosa hak hidup itu. Perdjuangan demikian menjimpulkan tiga prinsip sebagai azas, jaitu :

1. Prinsip hak hidup sebagai bangsa jang merdeka (nasionalisme).
2. Prinsip persamaan diantara semua umat (demokrasi dan pri-kemanusiaan)
3. Prinsip keadilan dalam pergaulan hidup (keadilan sosial).

Ketiga prinsip sebagai azas perdjuangan Rakjat Indonesia itu dilandasi oleh azas jang lebih dalam lagi, jaitu pandangan hidup Ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Nilai2 spirituil itu mendorong dan mendjiwai keseluruhan perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan dan untuk mengisi **kemerdekaan.**

Rakjat Marhaen dan Marhaenisme. Rakjat Indonesia jang diperkosa hak hidupnja oleh imperialisme, kapitalisme dan feodalisme baik jang tradisionil maupun modern, disebut **Rakjat Marhaen.** Rakjat Marhaen adalah Rakjat Indonesia jang mendjadi melarat, menderita dan terbelakang karena sistim pendjadjahan dan sistim kapitalisme jang telah memperalat feodalisme. Rakjat Marhaen adalah mereka jang berkepen-

tingan untuk enjahnja setiap djenis imperialisme, untuk berachirnja semua sistim kapitalisme dan tiap djenis feodalisme; dan untuk adanja tata-hidup bermasjarakat dan bernegara jang bersih dari musuh2 kemanusiaan, bersih dari musuh2 keadilan, bersih dari segala djenis dan bentuk kedjahatan. Rakjat Marhaen oleh karenanja bertjita2 dan berfahamkan **kemerdekaan bangsa, persamaan umat manusia** dan **keadilan sosial** dengan **dilandasi semangat** dan **kejakinan hidup Ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Inilah Marhaenisme.** Dan inilah pula **Pantjasila.**

Rakjat Marhaen dan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tjita2 Rakjat Marhaen untuk sebagian dan dalam tingkat pertama telah terwudjud dalam bentuk Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia memanifestasikan tjita2 Rakjat Indonesia untuk mendjadi Bangsa jang merdeka.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wadah perdjuangan Bangsa Indonesia untuk memenuhi segala aspirasinja, dan mendjadi alat fungsionil untuk mewudjudkan segala tjita2nja.

Kini setelah 25 tahun merdeka, Rakjat Marhaen mendapat peladjaran sedjarah berharga. Tibalah waktunja untuk berdjuang lebih teratur

dan lebih berentjana, serta untuk mengkonsolidasikan hasil2 perdjuangan. Mendjadilah kewadjiban Rakjat Marhaen dan para pemimpinnja untuk lebih mengkonkritkan lagi faham perdjuangan Marhaenisme dalam bentuk konsepsi2 pelaksanaannja.

Marhaenisme sebagai ideologie dan teori perdjuangan.

Marhaenisme jang diemban oleh Partai Nasional Indonesia lahir dan ditempa dalam perdjuangan Rakjat Indonesia menghantjurkan imperialisme, kapitalisme dan feodalisme, untuk kemudian membangun tata-masjarakat baru jang mendjamin kemakmuran dan keadilan.

Marhaenisme adalah fahamnja Rakjat Marhaen tentang masjarakat dan negara jang ditjita-tjitakannja. Faham tentang masjarakat dan negara ini menjimpulkan prinsip2 jang dipakai sebagai pangkal tolak atau sebagai landasan berfikir dan djuga prinsip2 jang ditjita-tjitakan serta diperdjuangkan pelaksanaannja. Prinsip2 itu merupakan kejakinan tentang kebenaran dan keharusan.

Sebagai **faham kemasjarakatan** dan faham kenegaraan, Marhaenisme adalah **ideologie.**

Disamping itu Marhaenisme jang lahir dan ditempa dalam perdjuangan Rakjat Indonesia

adalah djuga **faham (teori) perdjuangan** Rakjat Marhaen untuk mewudjudkan tjita2nja.

Sebagai faham perdjuangan, Marhaenisme menjimpulkan prinsip2 atau pokok2 pendirian untuk dipakai dan dipenuhi (dikerdjakan) didalam perdjuangan. Tudjuannja adalah untuk mendjamin suksesnja perdjuangan itu.

Djadi Marhaenisme adalah **ideologie dan teori perdjuangan sekaligus.** Sebagai ideologie Marhaenisme mentjita-tjitakan Masjarakat Adil dan Makmur. Sebagai teori perdjuangan, Marhaenisme mengadjarkan keharusan berfikir dan berbuat bagi Rakjat Marhaen untuk mentjapai sasaran tjita2nja.

BAB II.

MARHAENISME SEBAGAI FAHAM KEMASJARAKATAN DAN FAHAM KENEGARAAN

Socio Nasionalisme dan Socio Demokrasi dilandasi Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Prinsip kemerdekaan bangsa, prinsip persamaan, prinsip keadilan, didalam Marhaenisme dirumuskan mendjadi dua pokok, jaitu **Socio-Nasionalisme** dan **Socio-Demokrasi.** Dan **Ke-Tuhanan Jang Maha Esa** mendjadi landasan kerochanian jang mengilhami dan mendjiwai Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi itu.

Socio-Nasionalisme tjita2 universil.

Socio Nasionalisme adalah **Nasionalisme jang adil, beradab dan berkeprimanusiaan** Socio-Nasionalisme mengakui dan mendjundjung tinggi hak hidup setiap bangsa. Sosio-Nasionalisme menghormati kepentingan hidup setiap bangsa. Socio-Nasionalisme mentjita-tjitakan susunan dunia jang terdiri atas bangsa2 jang merdeka-berdaulat disegala bidang dengan hidup berdampingan rukun dan damai serta saling hormat-menghormati dan bekerdja-sama untuk kepentingan kemadjuan dan kemanusiaan.

Socio-Nasionalisme adalah Nasionalisme jang demokratis dan adil.

Socio-Nasionalisme menghendaki susunan dunia atas dasar **kemerdekaan** bangsa2, **persamaan** hak, derajat dan kesempatan bagi semua bangsa, serta **keadilan** dalam pengaturan tertib-dunia. Socio-Nasionalisme men-tjita2kan **susunan masjarakat dunia jang demokratis dan adil.** Socio-Nasionalisme berkejakinan bahwa hanja dengan djalan ini bisa ditjapai perdamaian dunia jang kekal dan abadi. Hanja dengan djalan ini bisa diusahakan kemadjuaan dan peningkatan taraf hidup umat manusia lahir dan batin.

Socio-Demokrasi mendjamin kemerdekaan, persamaan dan keadilan.

Socio-Demokrasi adalah Demokrasi jang adil dan berke-primanusiaan. Socio-Demokrasi mendjundjung tinggi prinsip2 keadilan, kemerdekaan dan persamaan antar-manusia dan antar-bangsa sebagai pangkal tolak dan sebagai tjita2 untuk diwudjudkan.

Persamaan sebagai pangkal tolak berarti setiap orang pada dasarnja dalam segala hal mempunjai hak jang sama dan kesempatan jang sama, bahwa dalam tertib-masjarakat dan tertib negara

tidak seorangpun jang mempunjai hak2 istimewa atau kesempatan2 istimewa karena keturunan, asal-usul atau karena kedudukan sosial.

Persamaan sebagai tjita2 kemasjarakatan dan tjita2 kenegaraan berarti bahwa persamaan antar-manusia dan persamaan antar-bangsa harus mendapat perwudjudan dalam tertib-masjarakat, dalam tertib negara, dan dalam tertib-dunia. Persamaan dalam kehidupan bersama ini diwudjudkan dibidang sosial, dibidang ekonomi, dibidang kebudajaan dan dibidang politik sekaligus.

Dan karena itu tata-sosial, tata-ekonomi, tata kebudajaan dan tata politik harus mentjerminkan dan mendjamin adanja persamaan itu.

Socio-Demokrasi adalah demokrasi riil, demokrasi disegala bidang.

Dengan demikian Socio-Demokrasi merupakan faham demokrasi jang riil, atau njata, bukan demokrasi formil atau demokrasi jang sekedar menghiasi peradaban dari luar. Socio-Demokrasi bukan demokrasi padjangan, bukan demokrasi hiasan melainkan **demokrasi njata,** jang mengisi peradaban manusia dan jang membawa kemadjuan bagi umat manusia.

Socio Demokrasi bukan sadja mengakui persamaan, tetapi djuga **mendjamin adanja persamaan**. Socio Demokrasi bukan sadja mendjundjung tinggi kedaulatan rakjat didalam negara, tetapi djuga **mendjamin berlangsungnja kedaulatan rakjat** didalam negara. Socio Demokrasi mengakui dan mendjamin sekaligus persamaan antar-bangsa-bangsa, antar-semua golongan, antar-seluruh umat manusia. Socio Demokrasi mendjundjung tinggi dan sekaligus mendjamin kedaulatan rakjat dalam negara. Kedaulatan rakjat dalam setiap organisasi dan pergaulan hidup manusia.

Demikin djuga halnja dengan prinsip keadilan sosial menurut Socio Demokrasi. Prinsip keadilan sosial bukan se-mata2 berlaku sebagai pangkal tolak dalam melihat dan menjelesaikan sesuatu, melainkan djuga sebagai tjita2 untuk diwudjudkan dalam pergaulan hidup. Socio Demokrasi dengan demikian bukan sadja mendjundjung tinggi prinsip keadilan sosial, melainkan djuga **mendjamin terwudjudnja** keadilan sosial itu. Keadilan sosial menurut faham Socio Demokrasi harus mendjadi kenjataan sedjarah.

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Itulah tjita2 keduniaan menurut faham Marhaenisme. Tjita2 keduniaan ini dilandasi oleh Ke-Tuhanan

Jang Maha Esa jang mejakini adanja **Tuhan** sebagai **pentjipta segala keadaan** dan **kedjadian.** Kejakinan hidup ini mengakui bahwa kebenaran mutlak dan kekuasaan mutlak ada pada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa segala sesuatu pada achirnja ditentukn oleh Tuhan Jang Maha Esa.

Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi sesuai dengan Hukum Kodrat Tuhan.

Marhaenisme mejakini bahwa prinsip2 kemerdekaan persamaan dan keadilan seperti tersimpul didalam Socio Nasionalisme dan Socio Demokrasi adalah selaras dengan Hukum Kodrat Tuhan Jang Maha Esa. Menurut Marhaenisme **Hukum Kodrat Tuhan mengharuskan** adanja kemerdekaan, mengharuskan adanja **persamaan,** mengharuskan adanja **keadilan,** bagi umat manusia,

Hukum Kodrat Tuhan ini mengharuskan manusia mengusahakan dan mewudjudkan sendiri ketiga kaidah itu. Dan umat manusia memang sudah diberi kemampuan dan segala peralatan untuk itu.

Hari Depan Umat Manusia menurut

Dengan berlandaskan pada pandangan hidup demi-

katja mata Marhaenisme. kian, Marhaenisme mejakini bahwa tjita2 kemerdekaan, tjita2 persamaan dan tjita2 keadilan harus dan bisa diwudjudkan dalam kenjataan. Mewudjudkan tjita2 kemerdekaan, persamaan dan keadilan adalah keharusan perdjuangan hidup umat manusia. Perdjuangan mewudjudkan kemerdekaan, persamaan dan keadilan adalah perdjuangan mentjapai kemadjuan hidup umat manusia. Perdjuangan mentjapai kemadjuan adalah keharusan menurut Hukum Kodrat Tuhan.

BAB III.
MARHAENISME SEBAGAI TEORI PERDJUANGAN

Rakjat pangkal-tolak Marhaen-isme.

Sebagai teori perdjuangan, Marhaenisme bertolak dari kenjataan hidupnja Rakjat, dari kepentingan Rakjat, dari kekuatannja Rakjat, dan dari perdjuangannja Rakjat.

Rakjat Indonesia jang disebut Rakjat Marhaen, hidup dalam keadaan menderita, dalam keadaan kekurangan, dan papa sengsara, dalam keadaan terbelakang. Rakjat Marhaen berkepentingan untuk diachirinja penderitaan, kesengsaraan dan keterbelakangan. Rakjat Marhaen berkepentingan untuk adanja perbaikan kondisi hidup, berkepentingan untuk adanja kesedjahteraan kemakmuran dan kemadjuan.

Perdjuangan Rakjat Marhaen atas dasar kekuatan Rakjat Marhaen sendiri.

Kepentingan hidup Rakjat Marhaen ini harus dibela dan diperdjuangkan. Pembelaan kepentingan hidup ini dilakukan dengan menjusun dan membangun kekuatannja Rakjat Marhaen sendiri. Perdjuangan Rakjat Marhaen dengan demikian dilakukan atas dasar kekuatannja sendiri.

Dengan pangkal tolak itu, Marhaenisme melihat perdjuangan menegakkan kemerdekaan, persamaan dan keadilan dari sudut kehidupan dan kepentingan Rakjat, jaitu Rakjat Marhaen. Perdjuangan mewudjudkan kemerdekaan, persamaan dan keadilan menurut Marhaenis bersumber pada kehidupan Rakjat Marhaen sendiri, bertudjuan untuk kepentingan Rakjat Marhaen, dan berdasarkan kekuatan Rakjat Marhaen sendiri.

Pembangunan kekuatan Rakjat Marhaen.

Untuk memenangkan perdjuangan Rakjat Marhaen itu, maka kekuatan Rakjat Marhaen harus dibangun, harus disusun, harus dikembangkan dan harus diarahkan tepat pada sasarannja.

Membangun kekuatan Rakjat Marhaen pertama2 dilakukan dengan membangkitkan kesadaran sosial dan kesadaran politiknja; dengan menanamkan pengertian tentang kemungkinan2 dan kewadjibannja dalam perdjuangan; dengan membangun kepertjajaan pada kekuatan sendiri; dan dengan mengobarkan semangat perdjuangan jang menjala-njala.

Menjusun kekuatan Rakjat Marhaen dilakukan dengan mengatur setjara rapih organisasi barisannja; dengan menumbuhkan dan menjeleksi pemimpin2nja jang ulet, militant, tjakap

dan berani; dengan **menjelenggarakan latihan aksi2** politik diberbagai bidang setjara terus-menerus.

Pengembangan kekuatan Rakjat Marhaen dilaksanakan setjara **mental dan fisik** dalam organisasi kemasjarakatan dan politik, dalam posisi2 kekuasaan, dan dalam penjelenggarakan urusan2 pemerintahan negara.

Penggunaan kekuatan menudju sasaran.

Selandjutnja **tenaga dan kekuatan** jang sudah terhimpun digunakan **untuk mentjapai kemenangan2 jang mendjadi keharusan sedjarah.** Setiap kemenangan bagaimanapun djuga ketjilnja, merupakan modal untuk mentjapai kemenangan jang lebih besar lagi. Pengalaman dalam perdjuangan merupakan peladjaran jang berharga bagi perdjuangan selandjutnja.

Berdasarkan kemenangan2 jang sudah ditjapai dan berdasarkan pengalaman2 jang berharga Rakjat Marhaen dibawah bimbingan pemimpin2 jang tjakap menjusun **programnja** jang memenuhi dua fungsi, jaitu **memperbesar kemampuan dan kekuatan** Rakjat Marhaen, dan **mendjamin kemenangan2** besar bagi Rakjat Marhaen.

Kemenangan bagi Rakjat Marhaen ada djika sudah terwudjud kemerdekaan, persamaan dan keadilan dalam pergaulan kemasjarakatan dan ke

negaraan. Kemenangan bagi Rakjat Marhaen lebih berarti lagi djika sudah ditjapai taraf kesedjahteraan dan kemakmuran jang tinggi bagi Rakjat Marhaen.

Sasaran pokok perdjuangan Rakjat Marhaen merombak susunan masjarakat lama dan mengganti dengan susunan masjarakat baru.

Karena itu sasaran perdjuangan Rakjat Marhaen adalah merombak susunan masjarakat jang masih membenarkan perkosaan hak hidup rakjat, jang mempertahankan keistimewaan2 bagi perorangan atau golongan karena asal-usul, keturunan atau status sosial, jang membagi kekajaan dan pendapatan masjarakat setjara tidak merata dan tidak adil.

Sasaran perdjuangan Rakjat Marhaen adalah mengganti susunan masjarakat demikian dengan susunan masjarakat jang baru sama sekali, jaitu suatu **perumahan masjarakat dengan soko-guru baru, dengan fundamen baru, dengan landasan** baru, suatu masjarakat dengan djiwa dan wadjah baru sebagai hasil pelaksanaan Pantjasila.

Masjarakat baru tjita2 Rakjat Marhaen.

Susunan masjarakat baru ini adalah masjarakat jang mendjamin kebahagia-

an hidup setjara merata bagi seluruh Rakjat, jang mendjamin kemerdekaan bagi seluruh golongan dan semua orang, jang mendjamin persamaan bagi seluruh umat, jang mendjamin keadilan disegala bidang. Masjarakat baru ini hanja bisa dibangun setelah ditumbangkan tiang2 pokok lama jang tiada guna dan mendjadi penghambat kemadjuan, dan diganti dengan fundamen dan tiang pokok baru.

Perdjuangan revolusioner. Oleh karena itu, sasaran perdjuangan Rakjat Marhaen adalah **merombak dan mengganti** setjara **fundamentil** susunan masjarakat lama mendjadi masjarakat jang baru sama sekali. **Tidak ada kompromi** dalam perdjuangan ini. Sebab hanja didalam masjarakat baru itu bisa terdjamin segala kepentingan Rakjat Marhaen dan segala aspirasi Rakjat Marhaen.

Sebab hanja masjarakat baru itulah **masjarakat adil dan makmur.** Itulah **Masjarakat Marhaenis.** Itulah **Masjarakat Pantjasila.**

Kekuatan2 penggerak kemadjuan. Untuk melaksanakan perombakan dan penggantian susunan masjarakat setjara fundamentil, di Indonesia terdapat tiga kekuatan penggerak jang pokok.

Ketiga kekuatan ini adalah golongan tani, golongan buruh dan golongan tjendikiawan (intelegensia).

Tiga unsur ini harus dikoordinasikan dan dikombinasikan dalam derap langkahnja, serta di satu-padukan dalam gerak madjunja. Penghimpunan tiga kekuatan penggerak ini setjara berentjana dan rapih adalah suatu keharusan untuk mensukseskan perdjuangan Rakjat Marhaen.

Dalil2 perdjuangan Kaum Marhaen. Sebagai kesimpulan, perdjuangan Rakjat Marhaen memuat keharusan2 seperti berikut :

Hendaknja **Rakjat Marhaen sadar dan bangkit** menegakkan hak hidupnja.

Hendaknja **Rakjat Marhaen pertjaja pada kekuatan diri sendiri.**

Hendaknja Rakjat Marhaen membangun dan menjusun kekuatan serta merapihkan barisannja.

Hendaknja **Rakjat Marhaen mengobarkan terus semangat perdjuangannja menuntut keadilan dan kebenaran.**

Hendaknja **Rakjat Marhaen merombak masjarakat lama dan menggantinja** dengan masjarakat baru sama sekali jaitu **Masjarakat jang adil dan makmur.**

Hendaknja **Rakjat Marhaen pandai menghimpun dan mengarahkan geraknja kekuatan2 penggerak kemadjuan.**

Bersatu dan bergeraklah Rakjat Marhaen menjongsong hari depan jang bahagia.

B A B IV.

MARHAENISME DIBIDANG POLITIK

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus '45 sebagai emanasi tjita2 Rakjat Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah menghasilkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila. Tjita-tjita dan kekuatan Rakjat Indonesia sendiri jang mendjadi sumbernja. Dan berhasilnja mempertahankan dan menegakkan Negara Proklamasi 17 Agustus '45 adalah **bukti** njata **tentang kebenaran teori perdjuangan Marhaenisme.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila, modal pokok Rakjat Marhaen.

Hasil gemilang berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pantjasila adalah **modal pokok** Rakjat Marhaen **untuk dikonsolidasikan dan dikokohkan.** Dari sini Rakjat Marhaen bertolak meneruskan perdjuangannja membangun masjarakat baru, dan membangun dunia baru. Dalam wadah ini Rakjat Marhaen mengembangkan kekuatan dan kemampuannja. Didalam wadah ini pula Rakjat Marhaen mewudjudkan segala aspirasinja dan tjita-tjitanja.

Negara Pantjasila inilah jang harus mentjiptakan masjarakat adil dan makmur.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pantjasila adalah bagian dari Proklamasi 17 Agustus '45.

Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pantjasila adalah dua hal jang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kedua-duanja adalah bagian dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wudjud lahirnja, sedangkan Pantjasila adalah djiwanja. Kedua-duanja merupakan wu**djud tjita-tjita rakjat** Indonesia sebagaimana dinjatakan dalam sumpah pemuda 28 Oktober 1928 dan sebagaimana diterangkan diatas tentang prinsip2 kemerekaan, persamaan dan keadilan jang mendjadi azas perdjuangan Rakjat Indonesia.

Memang **Proklamasi Kemerdekaan** merupakan **puntjak** (klimaks) **perdjuangan Rakjat Indonesia dalam menghadapi imperialisme modern.** Karena Rakjat Indonesia mejakini kebenaran Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka Rakjat Indonesia mejakini pula kebenaran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pantjasila.

Essensialia UUD '45 adalah tjita2 Rakjat.

Susunan, haluan dan kewadjiban Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-

undang Dasar 1945. **Undang-undang Dasar 1945 ini memuat ketentuan2 pokok** atau ketentuan2 azasi jang merupakan **kelandjutan dari tjita2 politik dan tjita2 sosial Rakjat.** Tjontohnja adalah ketentuan2 mengenai **bentuk Negara Kesatuan,** mengenai bentuk **Republik,** mengenai **Hak Azasi Manusia,** mengenai **Kedaulatan ditangan Rakjat,** mengenai **Sistim Perwakilan Rakjat,** mengenai **Sistim Desentralisasi,** mengenai **Penguasaan oleh Negara Tjabang Produksi** jang penting, mengenai **Penguasaan Bumi, Air dan Kekajaan Alam oleh Negara,** mengenai **Sang Merah Putih, mengenai Bahasa Indonesia.**

Tjita2 Proklamasi 17 Agustus 1945 di tuntut pelaksanaannja.

Ketentuan-ketentuan pokok ini merupakan **bagian dari Proklamasi Kemerdekaan.** Ketentuan-ketentuan pokok ini **mendjiwai perdjuangan Rakjat Indonesia** setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dan pada waktu ini ketentuan-ketentuan pokok itu bukan sadja dibela dan dipertahankan, akan tetapi djuga **dituntut** oleh Rakjat Indonesia **untuk dilaksanakan** setjepat mungkin, supaja mendjadi kenjataan.

Kehidupan Politik Rakjat berdasarkan

Masih ada hal-hal penting jang belum diatur dalam

UUD 1945 dan Pantjasila.

UUD 1945. Jang perlu dikemukakan disini adalah dua soal. Pertama mengenai kehidupan politik rakjat. Kedua mengenai politik luar negeri.

Pasal 1 ajat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa **Kedaulatan** adalah ditangan **Rakjat,** dan pasal 28 UUD '45 antara lain mengharuskan adanja **kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan.** Dua pasal ini memberi petunjuk tentang susunan kehidupan politik dari Rakjat.

.....

Partai Politik untuk mewudjudkan kedaulatan Rakjat dan realisasi prinsip Kemerdekaan.

Rakjat hanja bisa berdaulat dalam negara djika mendapat kesempatan berorganisasi politik. Organisasi politik itu namanja partai politik. Fungsinja adalah mengikut sertakan sebanjak mungkin rakjat dalam proses politik, memberikan pendidikan politik setjara massal kepada rakjat, menjelenggarakan seleksi pemimpin politik, menjalurkan aspirasi rakjat, dan menjelenggarakan komunikasi politik.

Dengan adanja **partai politik, rakjat mendapat saluran untuk melaksanakan kedaulatannja.** Dengan adanja partai politik mendjadi terpenuhi pula **kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi rakjat.**

Sjarat-sjarat kepartaian.

Adanja partai politik dalam masjarakat harus memenuhi tiga sjarat.

Pertama, **azasnja** harus **sesuai dengan Pantjasila** dan adanja partai politik untuk membina serta mengembangkan kemampuan rakjat. Kedua, **tidak ada monopoli,** karena dapat menumbuhkan diktatur dan tidak mendjamin adanja perlombaan serta dynamika. Ketiga, susunan perimbangan kekuatannja **dapat menumbuhkan kepemimpinan jang stabil dan kuat.**

Keselarasan antara alat dengan tudjuan, antara upaja dengan tjita2 adalah keharusan menurut Pantjasila.

Dengan dipenuhinja tiga sjarat itu maka ada dua hal penting jang dapat ditjapai. Disatu pihak dapat didjamin kemerdekaan rakjat jang mendjadi sjarat utama bagi adanja kedaulatan rakjat.

Dilain pihak kekuasaan Rakjat itu mendjadi terarah pada sasaran perdjuangan rakjat sendiri, jaitu untuk mewudjudkan tjita2 tentang kemerdekaan, persamaan dan keadilan sosial, serta untuk meningkatkan kesedjahteraan dan kemakmuran rakjat.

Dengan demikian, maka prinsip2 kemerdekaan

persamaan dan keadilan bukan se-mata2 sebagai tudjuan, melainkan djuga dipraktekkan sebagai landasan kerdja untuk mentjapai tudjuan. Terdjadilah **kesesuaian antara tjita2 dengan tjara mewudjudkan tjita2, atau sebaliknja.** Mendjadi selaraslah, tjara berusaha dengan tudjuan usaha, tjara berdjuang dengan tjita2 perdjuangan, tjara hidup dengan tudjuan hidup. Maka terdjaminlah dari permulaan bahwa **perdjuangan tidak akan ingkar dan tidak akan menjimpang dari tjita2 perdjuangan.**

Pantjasila ideologi Bangsa Indonesia dan teori perdjuangan Bangsa Indonesia.

Keselarasan antara tjara mentjapai tjita2 dengan tjita2nja sendiri, didalam Negara Pantjasila dimungkinkan dan diwadjibkan karena dua sebab.

Sebab pertama adalah karena Pantjasila merupakan Dasar Negara jang didukung oleh segenap golongan dan semua lapisan rakjat tanpa ketjuali. Artinja ialah karena Pantjasila merupakan tjita2 seluruh rakjat Indonesia. **Pantjasila adalah emanasi dari djiwa Bangsa Indonesia.**

Sebab kedua adalah karena Pantjasila itu sendiri mengharuskan adanja keselarasan antara alat dengan tudjuan, antara upaja dengan tjita2

Pantjasila sebagai dasar Negara memuat kaidah2 mengenai kehidupan kenegaraan sebagai bentuk upaja untuk mentjapai tudjuan negara Pantjasila disamping menjimpulkan tjita2 rakjat, merupakan landasan bagi proses kehidupan kenegaraan dan kemasjarakatan. Djadi Pantjasila itu merupakan **ideologie negara dan teori mengatur negara**, atau ideologie Bangsa Indonesia dan teorie perdjuangan Bangsa Indonesia sekaligus.

Organisasi Golongan Karya dan Golongan Kepentingan mendapat tempat dalam proses politik.

Disamping partai politik, **organisasi kekaryaan dan organisasi golongan kepentingan** dapat pula merupakan **saluran kemauan dan kekuasaan rakjat.** Organisasi kekaryaan dan organisasi golongan kepentingan memperdjuangkan kepentingan chusus dari rakjat diberbagai bidang. Kepentingan2 chusus seperti kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan kulturil, mungkin sekali terdesak oleh djenis kepentingan umum jang terdapat dilapangan politik dan jang biasanja merdjadi titik berat perhatian dari partai2 politik. Oleh sebab **itu didalam proses pembuatan keputusan politik, kepentingan2 chusus ini perlu mendapat tempat tersendiri.**

Tempat2 itu disediakan baik disektor legislatif maupun disektor eksekutif, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.

Pemilihan Umum Sebagai saluran langsung bagi Kedaulatan Rakjat.

Adanja partai politik dan organisasi kepentingan atau karya didalam masjarakat, tidak tjukup untuk mengetahui dengan pasti tentang pendapat rakjat dan kemauan rakjat jang sebenarnja. Untuk mendekati kepastian itu, maka **pemilihan umum merupakan** suatu **tjara** jang sangat berguna didalam **mengukur pendapat serta kemauan rakjat,** pada sesuatu waktu dan keadaan.

Disamping sebagai alat pengukur bagi pendapat dan kehendak rakjat, **pemilihan umum** itu berfungsi djuga sebagai **penjalur kedaulatan rakjat,** sebagai **alat pengudji** bagi pemimpin2 politik, sebagai suatu **bentuk pendidikan politik** pada rakjat, sebagai suatu **bentuk pengikut-sertaan rakjat** setjara langsung dalam kehidupan politik, sebagai **tjara penjelenggaraan seleksi pemimpin2** politik, dan sebagai **dinamisator** kehidupan politik. Karena itu, pemilihan umum adalah satu bagian penting **dari demokrasi.** Oleh sebab itu pemilihan umum harus **dilaksanakan setjara berkala didalam Negara Pantjasila.**

Didalam pemilihan umum, Rakjat mendapat kesempatan untuk menjatakan keinginannja setjara bebas dan rahasia. Didalam pemilihan umum Rakjat menentukan pemimpin2 jang dipertjajainja. Pemilihan umum menggambarkan penilaian Rakjat jang sebenarnja. Memang **pemilihan umum** merupakan **pendjelmaan dari Kedaulatan Rakjat.**

Politik Luar Negeri Bebas Aktif, konsekwensi dari Pantjasila.

Menghadapi kenjataan dunia jang terbagi atas daerah2 pengaruh dari ideologie2 dan kekuasaan2 jang berlawanan, Indonesia harus mengambil posisi bebas dari pengaruh ideologie dan kekuasaan2 itu. Sebabnja karena Indonesia mempunjai ideologie sendiri jang berlainan, jaitu Pantjasila. Ideologie Pantjasila lebih tinggi nilainja daripada ideologie liberalisme dan marxisme jang berpengaruh didunia sekarang ini.

Kita mejakini bahwa ideologie **Pantjasila** akan **dapat merebut tempat jang penting didalam masjarakat dunia.**

Memenangkan Pantjasila dengan menjusun kekuatan internasional.

Karena mejakini kebenaran ideologie Pantjasila, kita berdjuang memenangkan Pantjasila didalam pergaulan

internasional. Berdjuang memenangkan sesuatu hanja berhasil djika disertai dgn kekuatan. Karena itu **penjusunan kekuatan nasional dan internasional** mutlak diperlukan.

Penggalangan kerdjasama dengan Negara2 dan Bangsa jang baru berkembang.

Menjusun kekuatan internasional pertama-tama dilakukan dengan **menggalang kerdja sama diantara negara-negara dan bangsa-bangsa jang mempunjai persamaan kepentingan.**

Indonesia mempunjai persamaan kepentingan dengan negara2 dan bangsa2 jang baru merdeka, jang baru berkembang, jang masih berada dalam keterbelakangan. Negara-negara jang baru berkembang ini adalah potensi dunia jang sangat besar. Penggalangan kerdjasama diantara negara-negara ini akan menumbuhkan kekuatan raksasa internasional jang dapat diarahkan pada usaha mendjamin perdamaian jang kekal dan untuk kemadjuan umat manusia.

Merobah susunan dan perimbangan kekuasaan dunia, serta membangun Dunia Baru.

Bersama-sama dengan bangsa-bangsa dan negara-negara jang baru berkembang kita merobah perimbangan kekuasaan dan susunan kekuasaan dunia. **Bangsa-bangsa dan Negara-negara baru bersama- sama merupakan kekuatan revolusioner**

jang mampu merombak susunan dunia sekarang dan menggantinja dengan tata-dunia baru jang men djamin perdamaian, kemadjuan dan kebahagiaan umat manusia. Untuk keperluan itu, organisasi kerdjasama perlu dibangun. Usaha-usaha kerdjasama diberbagai bidang dikonkritkan Sjaratnja adalah inisiatif dan kegiatan.

Kewaspadan internasional mendjadi keharusan. Menghadapi gerakan-gerakan jang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan internasional jang bersumber pada sesuatu pusat kekuasaan atau ideologie, Bangsa Indonesia harus waspada. Kelemahan kita dibidang ekonomi, kekurangan kita dibidang pertahanan, keterbelakangan kita dibidang tehnologie, menjebabkan Bangsa Indonesia mendjadi sasaran empuk. Indonesia dengan demikian bisa hanja mendjadi objek permainan.

Melantjarkan gerakan internasional dengan dukungan kekuatan ideologie politik-ekonomi sosial-kulturil. Indonesia harus dapat merobah posisi objek mendjadi posisi posisi subjek jang aktif. Untuk itu Indonesia perlu kemuka dengan gagasan jang bisa dilantjarkan. Memenangkan gagasan dan ideologie hanja bisa setjara gerakan teratur. Gerakan dilakukan untuk **menjusun kekuatan baru** dalam pertjaturan internasional.

Kekuatan baru internasional jang dibangun adalah **kekuatan ideologie, kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan sosial kulturil** jang mempunjai arti positif bagi perdamaian, kesedjahteraan dan kemadjuan umat manusia.

Pakta Pertahanan berlawanan dengan tjita2 perdamaian. Tidak termasuk didalam arti penjusunan kekuatan itu, djenis-djenis kekuatan jang dapat dipakai sebagai alat pemaksa atau alat memperkosa seperti Pakta Pertahanan dan perdjandjian-perdjandjian serupa itu. Sebab alat-alat demikian berlawanan dengan tjita-tjita kemanusiaan.

Kerdjasama regional, suatu prioritas. **Kerdjasama internasional didahulukan diantara negara-negara tetangga jang mempunjai persamaan kepentingan.** Kerdjasama regional adalah langkah pertama menjusun kekuatan.

Penjusunan kekuatan regional mendjadi bagian dari gerakan internasional negara-negara jang baru berkembang. Selandjutnja **konsolidasi kekuatan regional** akan **menambah daja hidup dan daja tahan kelompok negara-negara terbelakang.**

BAB V

MARHAENISME DIBIDANG EKONOMI

Tata-ekonomi marhaenis. Langkah-langkah njata untuk mewudjudkan persamaan kesempatan dan kemungkinan, untuk mendjamin kemerdekaan dan untuk mentjiptakan keadilan sosial bagi semua orang, harus dilakukan dibidang ekonomi dengan didukung oleh kekuasaan politik. Untuk memenuhi tjita-tjita Socio Demokrasi, suatu tata-ekonomi menggambarkan partisipasi seluruh rakjat menurut kemampuan masing-masing didalam proces produksi, dan mendjamin pembagian pendapatan masjarakat jang adil dan merata berdasarkan ukuran djasa masing-masing didalam proces produksi itu. Tata-ekonomi demikian harus dapat menjediakan lapangan kerdja bagi semua orang untuk mendjamin hak hidupnja setiap orang dan untuk menarik faedah maksimal dari setiap tenaga produksi. Dengan setjara berentjana dan menjeluruh daja-produksi masjarakat ditingkatkan melalui bentuk2 produksi dan bentuk2 kombinasi faktor2 produksi jang dapat dipertanggung-djawabkan dari sudut effisiensi dan dari sudut strategi

djangka djauh dengan mengingat keadaan tempat dan waktu. Itulah tata-ekonomi marhaenis.

Pokok2 pendirian tata ekonomi marhaenis.

Tata-ekonomi marhaenis menjimpulkan pokok2 pendirian sebagai berikut :

1. **Negara mempunjai rentjana ekonomi jang menjeluruh** untuk djangka djauh dan djangka dekat jang menggambarkan strategi pembangunan ekonomi jang djelas.
2. **Peranan dan tjampur tangan negara dibidang ekonomi** besar dan penting.
3. **Unit2 produksi jang vital berada ditangan Negara.**
4. **Kekajaan alam dikuasai oleh Negara.**
5. **Unit2 produksi tidak vital dibenarkan berada ditangan swasta, dan didorong** oleh Negara untuk berkembang meningkatkan daja produksinja.
6. **Negara mendorong berkembangnja bentuk usaha kolektif jang mentjerminkan kerdjasama** gotong rojong dan sifat kekeluargaan didalam proces produksi seperti misalnja koperasi.
7. **Tenaga manusia dan kekajaan alam adalah** pokok utama bagi usaha kemakmuran.
8. **Modal nasional mempunjai kedudukan se-**

bagai pokok didalam pembangunan, sedangkan modal dari luar hanja sebagai pelengkap.

Strategi pembangunan ekonomi marhaenis.

Untuk membangun ekonomi-marhaenis didjalankan strategi sebagai berikut :

1. Susunan ekonomi lama peninggalan sistim kolonial dan jang mengandung sifat2 kapitalis dan sifat2 feodal dirombak. Dibangun susunan ekonomi nasional jang membangkitkan kekuatan nasional, dan kemudian didorong menudju terbentuknja tata-ekonomi marhaenis.
2. Pembangunan disektor pertanian dengan intensifikasi dan ekstensifikasi segera dikerdjakan. Tetapi sektor industri perlu dengan segera digarap untuk peningkatan daja produksi jang tjepat dan untuk mengedjar ketinggalan2.
3. Penjaluran dan penggunaan modal asing dilakukan setjara selektif sesuai dengan strategi membangkitkan kekuatan nasional.
4. Pembangunan perusahaan2 vital dan perusahaan jang mengolah kekajaan alam dilakukan setjara rasionil oleh Negara deng-

an mengutamakan kepentingan nasional. Kantor2 dengan perusahaan asing dibidang ini harus didjamin hasilnja untuk sebesar-besar keuntungan Negara dan untuk kemakmuran Rakjat.

5 Penjediaan kesempatan kerdja adalah sasaran pokok pembangunan.

6. Penggunaan pendapatan nasional dilakukan dengan mengutamakan keperluan peningkatan daja-produksi masjarakat.

Struktur ekonomi peninggalan zaman kolonial jang harus dirombak. Pada waktu ini setelah 25 tahun merdeka, susunan ekonomi Indonesia masih mengandung banjak sifat2 lama jang berasal dari zaman kolonial. Imperialisme Barat telah mendjadikan Indonesia **se-mata2 sebagai penghasil bahan mentah untuk keperluan kapitalisme internasional.**

Kehidupan ekonomi Indonesia diatur menurut keperluan pemilik2 modal didunia Barat jang menghendaki keuntungan se-besar2nja dengan risiko se-ketjil2-nja. Dengan bantuan Pemerintah Kolonial jang bertugas terutama melajani kapitalisme Barat, modal dunia Barat bergerak

dibidang perkebunan dengan menarik keuntungan besar dari adanja buruh jang murah, tanah jang subur dan alam jang kaja raja. Dengan djumlah modal jang sedikit dapat ditarik keuntungan jang ber-limpah2 untuk kemudian mengalir mendjadi modal bagi pembangunan industri negara2 Barat.

Maka tetaplah ekonomi Indonesia bersifat agraris, tetaplah Indonesia tidak mempunjai industri, tetaplah Indonesia kekurangan modal, tetaplah Indonesia berlaku sebagai sapi perahan, tetaplah Indonesia terkebelakang, dan tetaplah Indonesia tergantung pada pasaran dunia. Mendjadilah Indonesia sangat perasa terhadap setiap gelombang konjunktur dunia.

Struktur baru menggantikan struktur lama

Struktur ekonomi peninggalan zaman kolonial jang se-mata2 dimaksudkan untuk melajani kapitalisme internasional, dan menjebabkan Indonesia tergantung pada keadaan luar, perlu segera dirombak dan diganti dengan struktur baru. Struktur baru ekonomi Indonesia harus mempunjai watak menguntungkan kepentingan Rakjat Indonesia dan membangunkan kekuatan Bangsa Indonesia. **Struktur baru harus dapat membuka lapangan**

kerdja se-banjak2-nja, memberi kemungkinan2 meningkatnja taraf hidup rakjat, dan mendjadikan Indonesia bisa berdiri atas kekuatan sendiri.

Pembangunan industri untuk kemadjuan Indonesia.

Guna bisa mengedjar ketinggalan2 disegala bidang, guna meningkatkan daja produksi masjarakat jang melebihi kenaikan djumlah penduduk, guna membuka kesempatan kerdja jang tjukup luas dan banjak, dan guna mendjadikan Indonesia berdiri atas kekuatannja sendiri, maka **pembangunan industri** adalah **keharusan mutlak.** Karena itu segala daja upaja perlu diarahkan pada sektor industri. Kekuatan modal nasional dikerahkan untuk industri. Kelebihan2 pendapatan nasional ditanam disektor industri. Bantuan modal luar negeri disalurkan untuk membangun industri. Politik perdagangan harus sesuai dengan dan menguntungkan bagi politik pembangunan industri. Segala pengorbanan direlakan demi kepentingan pembangunan industri. Inilah tindakan pertama untuk merombak struktur ekonomi lama jang mengikat Indonesia pada nasib terbelakang.

Langkah lain jang diperlukan untuk memadjukan industri.

Langkah revolusioner memadjukan industri perlu diikuti dengan langkah2 lain diberbagai bidang. Politik pendidikan dan **pengadjaran bertanggung** djawab atas penjediaan tenaga kerdja jang seirama dengan rentjana pembangunan. Penjusu**nan Anggaran Belandja Negara didasari oleh** pengertian bahwa nasib Bangsa Indonesia banjak tergantung pada sukses-tidaknja pemba**ngunan industri. Sistim dan mekanisme politik dalam negeri supaja mendukung dan mengun**tungkan pembangunan industri.

Politik luar negeri dapat mendjalankan peranan penting dalam membantu pertumbuhan industri. Pendek kata segala pemikiran dan kegiatan masjarakat diarahkan dan dipusatkan pada usaha penting ini.

Repelita Tahap Kedua mendjamin pembangunan industri.

Berhubung dengan itu **semua maka Rentjana Pembangunan Lima Tahun ta**hap kedua jang objektif un**tuk terselenggaranja pembangunan industri.** Repelita tahap kedua sejogianja menjiapkan lontjatan besar mengubah struktur ekonomi zaman kolonial mendjadi struktur ekonomi nasio-

nal jang madju. Persiapan2 untuk itu sebaiknja dilakukan sekarang djuga.

Kekuatan Nasional adalah modal pokok pembangunan.

Modal pokok untuk pembangunan adalah kekuatan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri sekedar pelengkap. Oleh sebab itu tindakan pertama jang sejogianja didjalankan adalah **pengerahan dan pembangunan kekuatan sendiri.** Didalam rangka ini dapat dilakukan kebidjaksanaan mengenai tiga sektor bentuk usaha, jaitu mengenai sektor swasta sektor koperasi dan sektor perusahaan negara.

Pembangunan kekuatan nasional disektor swasta.

Kebidjaksanaan disektor swasta dilakukan dengan djalan **memberi dorongan jang positif** kepada perkembangan usaha swasta nasional, dan dimana perlu **memberikan perlindungan atas dasar2 jang sehat.** Pemupukan dan pembinaan usaha swasta dilakukan dengan penjuluhan dan pengarahan, dengan memberi bantuan tehnis, dengan memberi fasilitas, dan sebagainja. Sedangkan perlindungan harus diartikan luas, jaitu perlindungan jang wadjar terhadap saingan kekuatan2 internasional rak-

sasa, dan djuga perlindungan terhadap kemungkinan usaha2 swasta nasional didjadikan kedok dan sarang modal asing se-mata2. Karena itu **kebidjaksanaan membina kekuatan nasional ini meliputi djuga pengawasan terhadap penjaluran dan geraknja modal asing didalam negeri.** Sebab adanja modal asing tidak boleh menghalang-halangi perkembangan modal nasional. Malahan sebaliknja diharapkan dapat membantu mempertjepat pembangunan modal nasional.

Pembangunan kekuatan nasional disektor koperasi. Bentuk usaha kolektif adalah salah satu bentuk demokrasi ekonomi. Karena itu usaha kolektif seperti koperasi2 atau djenis kerdjasama lain jang bermotif memelihara dan memadjukan kepentingan bersama, perlu dibina dan dipupuk perkembangannja. Koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit, jang sudah njata2 ada dalam tradisi Indonesia selajaknja mendapat perhatian dan perawatan kembali.

Gerakan koperasi didukung dan dibantu setjara njata oleh Negara dengan penjuluhan, pengawasan dan perlindungan. Kekuatan jang terbangkitkan didalam gerakan koperasi bukan sadja mempunjai sifat fisik-ekonomis, akan te-

tapi djuga merupakan kekuatan mental-ideologis. Semangat gotong rojong dan kepertjajaan pada kekuatan sendiri mendjadi terpelihara dan terbina. Sedangkan djiwa dan tjita2 demokrasi mendjadi terdjelma. Memang **koperasi** adalah **satu bagian dari ekonomi marhaenis.**

Pembangunan kekuatan nasional disektor usaha negara.

Posisi kuntji jang sangat penting ada pada sektor usaha negara. Usaha negara bergerak di-bidang2 jang vital dan menjangkut kepentingan Rakjat setjara menjeluruh. Karena itu penjelenggaraan usaha negara perlu lebih hati2 dan waspada. Tjara penjelenggaraannja lebih memerlukan djaminan2 objektif untuk suksesnja usaha, agar kekajaan rakjat tidak mendjadi sasaran perongrongan dari unsur2 djahat, agar tidak mendjadi mangsa permainan kepentingan asing, agar tidak mendjadi korban salah urus dan garis kebidjaksanaan jang tidak benar. Undang2 perlu mengaturnja setjara terperintji djaminan2 objektif itu. Alat pengawasan tertinggi didalam negara sebaiknja mentjampuri urusan ini.

Pembangunan kekuatan nasional disektor usaha negara adalah jang paling berarti karena luasnja usaha dan karena besarnja djumlah ke-

kajaan alam jang tersangkut. Pemusatan perhatian pada sektor ini merupakan keharusan. Dengan penggunaan tenaga terpilih jang tepat, dengan pengarahan usaha jang baik, dengan penjelenggaraannja jang rasionil berdasarkan hasil2 penemuan terbaru disektor ini akan membawa hasil jang menentukan bagi keseluruhan ekonomi Indonesia.

Bangunan Hukum bagi usaha negara. Mengenai **bangunan hukum** jang dipakai bagi usaha negara perlu diingat **fungsinja didalam pembangunan kekuatan nasional.** Berdasarkan pengalaman negara2 lain dan dengan mengingat situasi chusus Indonesia, bangunan hukum jang dipakai harus merangsang seleksi tenaga jang baik, dapat memberi dorongan kerdja jang maksimal, memelihara dinamika jang tinggi dan djuga mendjamin perlindungan bagi kekajaan dan kepentingan nasional. Penentuan bangunan hukum seperti Perusahaan Negara, Perusahaan Umum dan Perseroan Terbatas bagi sesuatu djenis usaha sejogjanja dinilai dari sudut persjaratan2 itu.

Tiap bangunan hukum itu mempunjai sifat2 dan konsekwensi2 masing2 jang sebaiknja diperhitungkan baik buruknja bagi suatu djenis

usaha. Perseroan Terbatas misalnja membuka kemungkinan pendjualan saham kepada orang2 jang bermodal dan pengendalian kebidjaksanaan usaha atas dasar motif mentjari untung semata mata menurut keinginan pemegang saham jang pada suatu saat bisa berlawanan dengan kepentingan umum. Penggunaan bangunan demikian bagi usaha negara tentu sebaliknja terbatas pada bidang jang tidak menjangkut terlalu banjak kepentingan rakjat, misalnja terbatas pada bidang perdagangan, pengangkutan dalam lingkungan ketjil, perindustrian menengah dan sebagainja. Sedangkan bagi usaha negara jang menjangkut kesedjahteraan orang banjak dan kepentingan2 umum sebaiknja dipakai bangunan lain.

Kerdja sama dengan kekuatan asing. Kerdjasama dengan perusahaan asing untuk mengolah kekajaan alam Indonesia didalam bidang2 jang vital seperti perminjakan, pertambangan, perkajuan, perikanan dilakukan dengan **mengutamakan kepentingan nasional djangka djauh.** Ke-hati2an dan kewaspadaan sangat diperlukan. Penarikan keuntungan bagi se-besar2 kemakmuran rakjat adalah keharusan. Guna mendjamin hal ini per-

lu ada pengawasan rakjat setjara terbuka dan terus menerus.

Dewan Perusahaan sebagai satu bentuk participasi social dan pengawasan sosial.

Participasi sosial dan pengawasan sosial adalah bagian dari proces demokrasi. Chususnja bagi usaha negara jang vital hal itu sangat diperlukan. Dan pada umumnja didalam setiap unit produksi dimana terdjalin djumlah tenaga kerdja dan modal jang tjukup banjak, perlu dilaksanakan participasi dan pengawasan sosial dalam bentuk **dewan perusahaan jang mewakili semua unsur produksi untuk penentuan kebidjaksanaan usaha.** Bukan sadja satu segi dari demokrasi ekonomi terdjelma, akan tetapi djuga keselamatan dan kemadjuan usaha bisa terdjamin.

Pasal2 33 dan 27 UUD 1945 dan demokrasi ekonomi.

Pokok2 tentang demokrasi ekonomi telah tertjantum didalam pasal 33 Undang2 Dasar 1945. Karena pentingnja pasal ini baiklah dikutip bunjinja sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Tjabang2 produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara.

3. Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk se-besar2 kemakmuran Rakjat.

Pendjelasan resmi atas pasal 33 Undang2 Dasar 1945 menegaskan lebih landjut arti demokrasi ekonomi sbb : "Dalam pasal 33 tertjantum **dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerdjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota2 masjarakat. Kemakmuran masjarakatlah jang diutamakan** bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. **Bangunan perusahaan** jang sesuai dengan itu ialah **koperasi.** Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu **tjabang2 produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak harus dikuasai oleh negara, Kalau tidak,** tampuk produksi djatuh ketangan orang seorang jang berkuasa dan rakjat jang banjak ditindasnja.

Hanja **pengusaha jang tidak menguasai hadjat hidup orang banjak boleh ditangan orang seorang**

Bumi dan air dan kekajaan alam jang dikandung dalam bumi adalah pokok2 kemakmuran rakjat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk se-besar2 kemakmuran rakjat. Begitu pula pasal 27 ajat 2 UUD 1945 meletakkan prinsip penting bagi kehidupan ekonomi Indonesia.

Pasal itu berbunji : **Tiap warganegara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.**

Ketentuan ini meletakkan suatu kewadjiban pada negara untuk mendjamin kesempatan kerdja dan penghidupan jg lajak bagi warganegara. Ini berarti bahwa tata-ekonomi Indonesia harus tersusun sedemikian rupa sehingga senantiasa tersedia pekerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi semua warganegara. Tata-ekonomi demikian tidak bisa lain daripada **ekonomi-socialis** jang menghendaki aktivitas negara dalam urusan ekonomi.

Pokok2 pendirian jang terumus didalam pasal 27 dan 33 Undang2 Dasar 1945 beserta pendjelasannja sudah tjukup memberi petundjuk dan patokan tentang pelaksanaan **Pantjasila dibidang ekonomi.** Segala kebidjaksanaan dan kegiatan pemerintahan diharapkan sedjalan dan senafas dengan prinsip2 jang terkandung didalam pasal2 ini. Menjimpang dari pasal 33 dan 27 berarti kurang memenuhi tjita2 keadilan dan tjita2 demokrasi dari Rakjat Indonesia.

B A B VI.

MARHAENISME DIBIDANG SOSIAL.

Bidang sosial tempat kelahiran tjita-tjita demokrasi

Tuntutan akan kemerdekaan, persamaan dan keadilan lahir dan tumbuh untuk pertama kalinja didalam pergaulan hidup bermasjarakat sehari-hari Berabad abad lamanja umat manusia mengalami perbudakan. Ribuan tahun umat manusia mendjadi korban dari ideologie-ideologie dan sistim-sistim jang membenarkan perbedaan atas dasar asal usul dan keturunan. Penderitaan jang paling langsung dirasakan adalah dalam kehidupan bermasjarakat sehari-hari. Orang dibedakan kedudukannja dalam kelas terhormat dan kelas hina-dina. Orang dibeda-bedakan kesempatan dan hak hidupnja menurut asal-usul atau keturunan.

Orang harus lahir dengan menerima nasib jang ditentukan orang lain.

Arti demokrasi dibidang sosial.

Demokrasi dibidang sosial berarti bahwa setiap orang mempunjai kedudukan jang sama, mempunjai hak dan kewadjiban jang sama, mempunjai kesempatan-kesempatan hidup jang sama, apapun asal-usulnja, apapun djenisnja, apapun kemampuannja, dan apapun kejakinan hidupnja. Kemadjuan berfikir umat manusia telah membenarkan tjita-tjita persamaan sosial ini, dan menolak setiap ideologie jang hendak mengembalikan perbedaan-perbedaan sosial itu. Dan Marhaenisme adalah suatu pendjelmaan dari kemadjuan berfikir ini.

Tata-sosial Indonesia dan alam pikiran lama.

Tata-sosial masjarakat Indonesia sebagai hasil proces sedjarah masih banjak mengandung unsur-unsur dari alam pikiran lama. Imperialisme selama tiga setengah abad berkepentingan untuk terpeliharanja feodalisme. Sebaliknja kemadjuan berfikir merupakan antjaman jang membahajakan kelangsungan hidup imperialisme. Karena itu imperialisme berkepentingan untuk terikatnja rakjat Indonesia pada tradisi dan kejakinan hidup lama. Terpetjahnja masjarakat Indonesia atas kasta-kasta, atas go-

longan ningrat dan golongan djelata, atas sikaja dan simiskin, atas kelas pengreh dan kelas jang diperintah, atas berbagai suku-bangsa jang berlawanan satu sama lain, adalah kenjataan sosial jang harus dipelihara karena menguntungkan imperialisme. Karena itu tiga setengah abad bangsa Indonesia terkekang dalam alam pikiran lama.

Marhaenisme pendjelmaan alam pikiran baru.

Alam pikiran lama terdjelma didalam tata-bahasa, tata keluarga, tata-krama, tata-susila, tata-moral, tata-hukum, tata-ekonomi, tata-negara, pendek kata disegala bidang.

Marhaenisme sedjak tahun 1927, dan Pantjasila sedjak tahun 1945, menghembuskan angin baru, membawa alam pikiran baru, jang sasarannja perombakan alam pikiran lama dan pembangunan tata-hidup baru. Oleh karenanja pasal 27 UUD 1945 berbunji :

1. Segala Warga Negara bersamaan kedudukannja didalam Hukum dan Pemerintah **dan wadjib mendjundjung Hukum dan Pemerintah** itu dengan tidak ada ketjualinja.
2. **Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pe-**

kerdjaan dan penghidupan jang lajak bagi kemanusiaan.

Arti pasal 27 UUD '45 dibidang sosial.

Pernjataan bahwa setiap warga-negara bersamaan kedudukannja didalam hukum, bukan sadja penting artinja dibidang politik, melainkan djuga penting artinja dibidang sosial. Dibidang sosial, prinsip ini mengandung arti dan konsekwensi bahwa semua warga negara **mempunjai kedudukan sosial serta hak dan kewadjiban sosial jang sama.** Demikian halnja didalam perkawinan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam kedudukannja dan dalam hak serta kewadjibannja. Didalam urusan warisan sama kedudukannja dan haknja antara anak laki dan anak perempuan. Didalam kesempatan kerdja tidak ada hak-hak istimewa bagi seseorang karena asal usul, keturunan atau karena djenis. **Prinsip ini harus terdjelma didalam hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum waris, dan hukum perburuhan Indonesia.**

Perlindungan terhadap golongan lemah.

Tidak dapat disangkal bahwa didalam setiap masjarakat selalu terdapat golongan jang lemah. Dalam sedjarah kehidupan manusia, golongan lemah ini mendjadi mangsa golongan

jang kuat. Didalam peradaban lama telah mendjadi tradisi bahwa golongan lemah pada hakekatnja diperkuda oleh golongan kuat dan diperkosa hak hidupnja.

Tjita-tjita peri-keadilan dan peri-kemanusiaan jang mendjadi isi hati-nurani umat manusia tidak dapat membenarkan kelangsungan tradisi lama itu. Rasa keadilan dan kemanusiaan menghendaki adanja perlindungan masjarakat terhadap golongan lemah itu. **Golongan lemah tidak untuk dibiarkan dalam keadaan lemah. Golongan lemah harus didjadikan kuat.** Untuk itu harus ada usaha dari masjarakat. Oleh sebab itu pasal 27 ajat 2 Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa **setiap warga negara berhak atas pekerdjaan dan penghidupan** jang lajak bagi kemanusiaan. Dan pasal 34 UUD '45 menentukan kewadjiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak jang terlantar.

Bentuk-bentuk usaha untuk melindungi dan memadjukan kepentingan golongan lemah.

Mengangkat deradjat golongan lemah dilakukan dgn. memberi djaminan-djaminan hukum, dengan membuka kesempatan kerdja jang luas, dengan meningkatkan kemampuannja melalui pendidikan dan pengadja-

ran, dengan bimbingan-bimbingan mental dan idcologis, dengan bantuan-bantuan fisik, dengan memberi perlindungan hidup dalam arti seluas-luasnja. Djaminan keselamatan kerdja, djaminan hari tua, djaminan kesedjahteraan keluarga, pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, penentuan upah minimum, penentuan djam kerdja dan sjarat-sjarat kerdja, pembukuan lapangan usaha, dan sebagainja, adalah bentuk-bentuk usaha untuk melindungi dan memadjukan kepentingan golongan lemah.

Buruh ketjil, tani ketjil, tuna karya, tuna netra, fakir miskin, anak-anak terlantar, adalah diantara golongan lemah jang meminta perlindungan chusus dari negara. **Marhaenisme berkewadjiban untuk melindungi dan memadjukan kepentingan golongan lemah ini.** Perundang-undangan mengenai hal itu harus segera diadakan.

Dengan terselenggaranja usaha-usaha melindungi dan memadjukan kepentingan kaum lemah, maka berbagai penjakit masjarakat seperti pelatjuran, perdjudian dan kedjahatan untuk sebahagian penting akan terberantas dengan sendirinja. Berbagai kemaksiatan lebih banjak bersumber pada kekurangan-kekurangan masjarakat dalam hal pemeliharaan kepentingan umum

daripada bersumber pada tabiat seseorang. Tata hidup bermasjarakat dapat mendorong perkembangan segi-segi positif dari djiwa manusia dan menjalurkan segala gerak hidup manusia kedjurusan jang menguntungkan masjarakat.

Dalam hubungan ini perlu ditundjukkan pada pentingnja usaha-usaha memadjukan kepentingan kaum wanita untuk mampu berdiri atas kekuatan sendiri, usaha-usaha membimbing golongan pemuda untuk dipersiapkan sebagai penanggung-djawab dihari depan.

B A B VII

MARHAENISME DIBIDANG KEAGAMAAN KEPERTJAJAAN DAN KEBUDAJAAN

Ketuhanan Jang Maha Esa sebagai kejakinan hidup Rakjat Indonesia.

Kejakinan akan Tuhan Jang Maha Esa sebagai Pentjipta dan Sumber segala keadaan dan kedjadian adalah kejakinan hidup segenap Rakjat Marhaen jang terkandung dalam azas Marhaenisme, Kejakinan demikian itu menghajati naluri dan pandangan hidup ummat Indonesia, jang mendjelma dalam hidup keagamaan dan kepertjajaan. Agama dan kepertjajaan kepada Tuhan Jang Maha Esa adalah hikmat illahi jang dikaruniakan kepada manusia sebagai tuntutan kebenaran, kebadjikan dan keadaban bagi kelangsungan serta kemaslahatan hidupnja didunia dan diachirat.

Ketuhanan Jang Maha Esa dan toleransi beragama.

Pemelukan agama adalah perbuatan jang benar, baik dan beradab sebagai hak azasi manusia karunia Tuhan.

Karena itu perkosaan, penggangguan atau penghinaan terhadap agama adalah pelanggaran hak azasi manusia. Paksaan dan intoleransi dalam hidup keagamaan adalah bertentangan dengan firman Tuhan.

"Tiada paksaan dalam agama". Dalam kehidupan beragama bukanlah pertentangan dan paksaan jang diridoi Tuhan, akan tetapi jang patut diamalkan adalah kerukunan serta toleransi beragama dan bimbingan kepada sesama manusia kearah kesadaran akan kebenaran, kebadjikan, keadilan dan keadaan tuntunan illahi jang terkandung dalam adjaran agama. Kemerdekaan beragama dan kemerdekaan mendjalankan ibadat keagamaan atas kepertjajaan dan demi bertakwa kepada Tuhan Jang Maha Esa adalah hak azasi manusia jang harus dihormati dan dilindungi.

Agama dan peradaban. Sesungguhnja amal perdjuangan kearah mentjapai kekeadilan, kemadjuan dan peradaban jang lebih sempurna dalam kehidupan beragama, bermasjarakat dan bernegara, adalah amal ibadat didjalan Allah jang benar, sutji serta mulia dan karena itu diridoi oleh Tuhan. Perdjuangan manusia untuk menghapuskan penderitaan dan kesengsaraan demi terwudjudnja kebahagiaan hidup lahir-bathin adalah hak dan kewadjiban manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia berhak dan berkewadjiban untuk memelihara hidupnja jang dimilikinja atas karunia Tuhan dan berusaha mentjapai kemadjuan dan kesempurnaan hidup lahir-bathin dengan

djalan jang diridoi Tuhan jaitu diatas djalan jang benar, baik dan beradab.

Karena itu adalah suatu keharusan bagi manusia untuk memberantas segala kesesatan, keburukan, kedjahatan dan kebiadaban jang ada pada diri pribadinja dan didalam masjarakatnja, serta membina segala kekuatan idiil-bathiniah dan materiil-lahiriah jang benar, baik dan beradab dalam kehidupan pribadi dan masjarakatnja. Djalan hidup jang diridoi Tuhan bukanlah tekad, pikiran atau amal-perbuatan jang sesat, serakah, dhalim, rakus, djahat atau biadab, melainkan djalan hidup jang sungguh2 berfaedah bagi perdamaian, keamanan, kerukunan, kerdjasama, kehidup individu dan masjarakat.

Bidang kebudajaan tempat pemeliharaan dan penjempurnaan nilai-nilai spirituil.

Bidang kebudajaan merupakan satu sektor kehidupan manusia dimana dilakukan kegiatan2 pembentukan, pemeliharaan dan pengembangan nilai2 spirituil umat manusia. Termasuk didalamnja kegiatan2 pendidikan-pengadjaran, kegiatan kesenian, kegiatan ilmu pengetahuan dan lain2 kegiatan.

Didalam bidang kebudajaan ini berlangsung proces pembentukan dan penggantian pemeliharaan dan pelandjutan, pengembangan dan pe-

njempurnaan dari segala perbendaharaan per-adaban manusia.

Marhaenisme menghendaki supaja segala djenis **kegiatan kebudajaan** dilakukan **sesuai dengan prinsip2 kemerdekaan, persamaan dan keadilan.** Kegiatan2 dibidang kebudajaan harus dilakukan atas dasar prinsip2 itu, dan membantu terwudjud nja prinsip2 itu didalam kenjataan.

Pendidikan dan fungsinja. **Pendidikan dan pengadjar-an diselenggarakan bagi se-**mua orang tanpa ketjuali. Pendidikan dan pe-ngadjaran berfungsi bukan sadja mewariskan nilai2 kehidupan, melainkan djuga membentuk manusia baru dengan nilai2 baru serta setjara aktif memadjukan kehidupan rakjat dan ke-mampuan rakjat

Oleh karena itu pendidikan harus terselenggara seluas-luasnja untuk segala keperluan atas beban negara. Sebab **hanja dengan pendidikan segala ketinggalan dan keterbelakangan dapat dikedjar.**

Disamping fungsi umum, sistim pendidikan **Indonesia harus mengandung djuga politik pem-binaan Kesatuan Bangsa** sesuai dengan sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan tjita2 Proklamasi Kemerdekaan. Begitu pula pendidikan dapat

mendjalankan peranan penting dalam mensukseskan rentjana2 pembangunan jang memerlukan tenaga terlatih diberbagai bidang. Dari segi mental-spirituil, **pendidikan** merupakan **tulang punggung** bagi **pembangunan** dalam arti seluas-luasnja.

Oleh karena itu sistim pendidikan jang dipakai harus **didasarkan atas dasar kenjataan sosial Indonesia dan atas dasar kepentingan Bangsa Indonesia.** Dengan memakai dasar ini maka sistim pendidikan dan pengadjaran di Indonesia harus menjimpulkan prinsip2 seperti berikut :

a. Pendidikan harus dapat **mentjapai masjarakat** Indonesia **setjara menjeluruh dengan memperhitungkan kelainan2** menurut tempat, lingkungan dan suasana dalam djangka waktu tertentu.
   Lingkungan suasana desa dan tani harus dibedakan dalam penggarapan dengan lingkungan dan suasana kota dimana perdagangan dan industri sedang berkembang. Kelainan2 sematjam ini memberi alasan kuat untuk penjelenggaraan decentralisasi dibidang pendidikan, baik setjara territorial maupun organis.
b. Pendidikan harus dapat **membangun dajakreasi** manusia Indonesia disegala bidang.

Untuk mentjapai tudjuan ini perlu diket mukan berbagai bentuk pelaksanaan pe didikan jang sesuai dengan lingkungan da suasana pada sesuatu tempat dan wakt

c. Pada tahap Indonesia masih dalam kead an terbelakang, pendidikan harus meng **utamakan kepentingan usaha mengedja** ketinggalan2 diberbagai bidang, chususnj dibidang ekonomi, karena itu sistim da rentjana pendidikan harus dapat mendja min djumlah dan kwalitas tenaga kerdj jang maksimal bagi setiap tahap perkem bangan masjarakat, **serta** mentjegah ter djadinja pemborosan2 dilihat dari sudu kepentingan nasional pada sesuatu waktu

d. Sistim pendidikan harus dapat **menanam kan keseimbangan diantara nilai2 intellek tuil dengan nilai2 tjita2** dalam hidup manusia Indonesia. Keseimbangan ini diperlukan untuk mendjamin agar manusia Indonesia disatu pihak mempunjai kemampuan intellektuil untuk berbuat sesuatu jang penting (berprestasi) dan dilain pihak mendapat dorongan kuat dari tjita2 untuk berbuat sesuatu jang menguntungkan bagi kemadjuan masjarakat dan negara.

Ilmu pengetahuan dan kemadjuan masjarakat.

Bersambungan dengan masalah pendidikan adalah kegiatan memadjukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangat penting artinja bagi kemadjuan umat manusia. Lebih banjak orang jang bergerak dibidang ilmu pengetahuan, lebih besar faedahnja bagi kemadjuan masjarakat. Oleh karena itu **ilmu pengetahuan harus terbuka bagi setiap orang jang berminat dan berbakat. Negara harus menjediakan segala facilitas** untuk keperluan itu.

Dengan terbukanja kesempatan bagi semua orang jang berminat dan berbakat, maka ilmu pengetahuan akan mempunjai fungsi kemasjarakatan jang lebih besar. **Ilmu pengetahuan dgn. demikian akan mempunjai peranan mempertjepat proces pembangunan dan kemadjuan.** Ilmu pengetahuan mendjadi lebih banjak pengabdiannja pada kepentingan rakjat.

Agar supaja dapat dimiliki dan dinikmati rakjat banjak **ilmu pengetahuan perlu disebarluaskan dalam bentuk2 jang populer.** Dengan penjebar-luasan ini maka akan terdjadi pembibitan jang luas untuk tjalon2 penggarap ilmu pengetahuan.

Dan masjarakat akan lebih kaja alam pikirannja dan akan lebih besar kreativitasnja. Sedangkan kekajaan alam pikiran dan kreativitas merupakan unsur penting bagi dinamik dan kemadjuan.

Kemerdekan berpikir adalah satu unsur penting bagi kemadjuan ilmu pengetahuan. Pembatasan terhadap kemerdekaan berfikir atas dasar kepentingan umum tidak boleh mengurangi atau mematikan daja-kreasi penggarap ilmu pengetahuan. Djaminan2 chusus bagi kemerdekaan berpikir dalam ilmu pengetahuan perlu mendapat pengaturan dalam undang2. Sedangkan persjaratan2 jang diadakan bagi kemerdekaan berpikir harus tetap mendjamin djuga kelangsungan participasi masjarakat luas dalam ilmu pengetahuan.

Memadjukan kreativitas dibidang kesenian.

Kreativitas jang didorong oleh tjita dan rasa manusia mendjelma didalam kesenian.

Kreativitas ini perlu dipelihara dan dikembangkan dalam masjarakat sehingga mendjelma dalam bentuk2 kesenian jang lebih sempurna jang selandjutnja dapat berfungsi sebagai alat pembentuk kepribadian manusia dan kepribadian masjarakat.

Fungsi seni tidak semata-mata untuk memenuhi tuntutan tjita-rasa manusia, melainkan dju ga harus sebagai alat pendidikan dan sebagai unsur pendorong kemadjuan masjarakat.

Berhubung dengan itu maka pemeliharaan dan pengembangan kesenian harus mendapat pengarahan atas dasar kepentingan masjarakat. Dalam hal ini negara dan masjarakat sejogianja mendjalankan peranan jang aktif dalam pembinaan kesenian tanpa merusak sumber kreativitasnja.

Salah satu unsur penting jang mendorong daja-kreasi adalah kemerdekaan untuk menjatakan sesuatu, hal mana telah digariskan oleh pasal 28 UUD '45. **Kemerdekaan dibidang seni ini perlu mendapat penjaluran dan pengarahan jang dilembagakan** dalam bentuk akademi, perhimpunan atau gerakan seni.

Alat2 komunikasi umum seperti pers, radio, televisi, dapat membantu usaha penjaluran, pengarahan dan pengawasan sekaligus. Sedangkan **pemupukan perhatian dan apresiasi masjarakat terhadap seni berarti memperbesar daja-pengarahan dan daja-pengawasan masjarakat.**

Perlakuan masjarakat terhadap seniman pada azasnja harus sama dengan perlakuan ter-

hadap ilmiawan. Masjarakat harus memelihara dan mendorong perkembangan daja-kreasi mereka dengan berbagai-djalan, dan berbagai bentuk penghargaan. Masjarakat harus memandang mereka sebagai wakil masjarakat dalam pembentukan dan pengembangan nilai2 spirituil. Seniman dan ilmiawan merupakan kekuatan pembangunan spirituil.

Pembangunan peradaban Pantjasila.

Nilai2 spirituil masjarakat terdapat dan berkembang djuga dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan, tata-krama, adat-istiadat atau tradisi, dan bahasa. Bentuk2 pergaulan hidup ini berubah djika terdjadi perubahan nilai2 spirituil jang didukung oleh masjarakat. Perubahan nilai spirituil dapat terdjadi karena masuknja nilai2 baru jang dipantjarkan oleh sinar2 kebudajaan masjarakat lain.

Pada waktu ini **Indonesia mengalami pengaruh langsung dan kuat dari peradaban Barat melalui** ilmu pengetahuan, pendidikan dan pengadjaran, kesenian, agama, falsafah, ekonomi dan politik. Tanpa tjukup disadari menjelinap kedalam masjarakat Indonesia **nilai2 spirituil Barat jang bersumber** pada pandangan **hidup dan falsafah chas Barat jaitu liberalisme dan komunisme** jang sangat berlainan dengan pandangan

hidup dan falsafah Bangsa Indonesia. Liberalisme mengagungkan hak hidup individu dan mengadjarkan bahwa djaminan bagi hak hidup individu hanja kemerdekaan jang mutlak bagi individu. Komunisme mengagungkan hak hidup kolektif dari suatu golongan atau klas dan mengadjarkan bahwa djaminan bagi hak hidup kolektif suatu golongan adalah dengan djalan meniadakan atau memberantas hak hidup lain baik dari perorangan maupun dari golongan lain. Kedua pandangan hidup jang mengandung konsekwensi-konsekwensi ekstrim ini merupakan sumber peradaban Barat jang memantjarkan sinarnja kedalam tubuh Bangsa Indonesia. Bahajanja adalah bahwa dengan terkonsolidasinja bentuk2 pergaulan hidup dan bangunan kemasjarakatan dan kenegaraan jang berasal dari peradaban Barat akan ikut terkonsolidasi dan berkembang dengan suburnja pandangan2 hidup Barat berupa liberalisme dan komunisme itu.

Menghadapi bahaja ini, Indonesia harus sada rakan kewadjibannja untuk menolak setjara selektif berbagai bentuk pergaulan hidup dan berbagai djenis bangunan kenegaraan dan kemasjarakatan jang berasal dari dunia Barat pada chususnja dan dari luar pada umumnja. Disamping itu mendjadi kewadjiban pula bagi kita untuk segera mendjelmakan pandangan hidup

Bangsa Indonesia, jakni Pantjasila dalam berbagai bentuk pergaulan hidup dan berbagai bangunan kemasjarakatan dan kenegaraan.

Ini berarti bahwa kita harus terus menerus memberi perhatian, pada perkembangan kebiasaan-kebiasaan hidup, tata-krama, adat-istiadat, bahasa, disamping bangunan2 politik, dan bangunan-bangunan ekonomi. Kita harus mengadakan pemikiran tentang pengembangan bentuk2 dan bangunan2 itu atas dasar Pantjasila jang hendak mendjamin keseimbangan antara kepentingan hidup pribadi dengan kepentingan hidup bersama antara kepentingan individu dengan kepentingan masjarakat. Nilai2 moril jang tersimpul didalam Pantjasila harus didjelmakan didalam dan bentuk-bentuk pergaulan dengan bantuan dari kemampuan intellektuil kita sendiri.

B A B VIII.

P.N.I. ALAT PERDJUANGAN RAKJAT INDONESIA.

Tudjuan mendirikan PNI.

P.N.I. didirikan pada tgl. 4 Djuli 1927 di Bandung Nama semua adalah Perserikatan Nasional Indonesia. Kemudian diganti mendjadi Partai Nasional Indonesia.

Para pendirinja adalah pemuda2 golongan tjendekiawan jang berkesadaran politik dan me rasa terpanggil hati nuraninja **untuk mengisi kekosongan kepemimpinan perdjuangan Rakjat melawan imperialisme** diwaktu itu. Pemuda2 itu adalah :

1. Ir. Soekarno, kemudian terkenal dengan sebutan 'Bung Karno'.
2. Ir. A n w a r i.
3. Mr. Sartono.
4. Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo.
5. Mr. Budhyarto.
6. Dr. S a m s i.
7. Mr. Sunario.
8. S u d j a d i.
9. J. Tilaar.

Ir. Soekarno dan Ir. Anwari berasal dari Algemene Studie Club di Bandung. Mr. Sartono,

Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Budhyarto, Dr. Samsi dan Mr. Sunario berasal dari Perhimpunan Indonesia (P.I.) di Negeri Belanda.

Pada tahun 1927 terdjadi kekosongan kepemimpinan bagi perdjuangan Rakjat karena Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1926 telah mengedjar-ngedjar dan memendjarakan ribuan pemimpin2 Rakjat dengan dalih memberontak terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dengan tindakan jang membabi buta dari Pemerintah djadjahan itu, Rakjat Indonesia kehilangan banjak pemimpinnja dan memerlukan pimpinan baru jang sanggup memimpin perdjuangan Rakjat melawan imperialisme dan mentjapai kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia.

Azat P.N.I. P.N.I. didirikan untuk **mengisi kekosongan kepemimpinan dan** untuk **meneruskan perdjuangan Rakjat menghantjurkan imperialisme serta membangun Negara Indonesia Merdeka.**

Azas jang dipakai adalah **nasionalisme** dan **demokrasi.**

Dengan azas nasionalisme, P.N.I. mentjitatjitakan agar Rakjat jang didjadjah oleh Pemerintah Hindia Belanda mendjadi satu Bangsa, jaitu Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini harus terhormat dan merdeka. Baru setelah mer-

dcka, Bangsa Indonesia dapat memadjukan kepentingan hidupnja dan kehormatannja sesuai dengan tjita-tjitanja.

Karena itu nasionalisme merupakan kekuatan tjita2 pendorong bagi perdjuangan kemerdekaan dan bagi perdjuangan mentjapai kemadjuan bagi Rakjat Indonesia.

Dengan azas demokrasi, P.N.I. mentjita-tjitakan **terwudjudnja persamaan bagi semua orang didalam masjarakat dan adanja kekuasaan rakjat didalam negara.** Azas demokrasi **menggantikan** azas **feodalisme** jang masih kuat didalam tradisi masjarakat Indonesia. Azas ini mendorong dan mengorbankan semangat perdjuangan Rakjat jang haus akan keadilan dan haus akan kemadjuan, karena sudah lama menderita akibat feodlisme, imperialisme dan kapitalisme.

Azas nasionalisme dan azas demokrasi jang ditjita-tjitakan oleh P.N.I. adalah lain daripada jang dimaksud dengan nasionalisme dan demokrasi jang diartikan didunia Barat dan dianut oleh berbagai kekuatan politik. Nasionalisme jang dianut oleh P.N.I. adalah nasionalisme jg demokratis, berkeperikemanusiaan dan adil, jaitu nasionalisme jang menghormati hak hidup bangsa2 lain dan menghendaki kerukunan hidup

diantara bangsa2 didunia untuk kepentingan bersama. Karena itu nasionalisme P.N.I. disebut **Sócio Nasionalisme.**

Begitu pula demokrasi jang dianut oleh P.N.I. adalah demokrasi jang berkeperikemanusiaan dan adil, dan oleh karenanja harus dilaksanakan bukan sadja dibidang politik, melainkan djuga dibidang ekonomi, sosial dan kebudaajan. Karena itu disebut **Socio Demokrasi.**

Pokok2 pendirian PNI didalam memimpin perdjuangan Rakjat.

Dengan bertolak dari dua azas tersebut diatas, P.N.I. menetapkan pokok2 pendirian sbb. :

1. **Imperialisme** adalah **sebab utama** dari segala **penderitaan** dan **keterbelakangan Rakjat.** Karena itu usaha memadjukan kepentingan Rakjat hanja dapat dilakukan djika sudah dibebaskan dari tjengkeraman imperialisme. Oleh sebab itu perdjuangan Rakjat harus ditudjukan langsung pada penumbangan dan penghantjuran imperialisme.

2. **Kemerdekaan** Bangsa Indonesia adalah **satu-satunja** djembatan untuk **mentjapai kemadjuan Rakjat.** Oleh karena itu ke-

merdekaan mendjadi tuntutan mutlak dari Rakjat Indonesia. Sembojannja adalah: **"Indonesia Merdeka Sekarang Djuga".**

3. Untuk menumbangkan imperialisme dan memenangkan kemerdekaan, Rakjat Indonesia harus mendjalankan **massa-aksi setjara besar-besaran berdasarkan kekuatan sendiri.** Kekuatan sendiri ini harus dibangun dengan djalan membangkitkan kesadaran nasional dan semangat nasional, dengan mengatur barisan Rakjat setjara rapih, dengan membangunkan kemauan Rakjat dibidang2 ekonomi, politik, sosial dan kulturil. Maka akan terselenggaralah Gerakan Kemerdekaan besar2an jang merombak susunan kekuasaan kolonial untuk diganti dengan susunan nasional.

4. Mentjapai kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia hanja dapat dilakukan dengan djalan **non-kooperasi dengan imperialisme.** Prinsip ini adalah konsekwensi logis dari kenjataan bahwa imperialisme tidak mungkin melepaskan kekuasaannja setjara suka rela atas dasar belas kasihan pada Bangsa Indonesia, tidak mungkin setjara ichlas memberikan kemerdekaan pada Bangsa Indonesia. Prinsip non-kooperasi ini di-

maksudkan pula untuk membebaskan Rakjat Indonesia dari budjukan2 dan tipu muslihat imperialisme, dan selandjutnja untuk mendorong Rakjat membangun kekuatan sendiri dan memperbesar kepertjajaan pada diri sendiri,

5. Perdjuangan melawan imperialisme dilakukan oleh Rakjat Indonesia setjara menjeluruh tanpa ketjuali atas dasar persamaan hak dan kewadjiban dengan tidak mengingat perbedaan asal-usul, kekajaan, pangkat, agama, atau djenis kelamin. **Semua orang mempunjai hak jang sama dan kemungkinan jang sama.** Prinsip ini ditegaskan untuk mewudjudkan azas demokrasi. Dan dengan prinsip persamaan ini mendjadi tergugah dan terbangkitkan semangat Rakjat banjak untuk ikut serta didalam perdjuangan memenuhi kewadjiban nasionalnja.

6. Perdjuangan mentjapai kemerdekaan dengan menghantjurkan imperialisme meminta pengorbanan kepentingan pribadi atau golongan. Oleh karena itu setiap pedjuang, chususnja pemimpin2 perdjuangan, harus dari permulaan menetapkan sikap berani memikul segala konsekwensi

perdjuangan jang berupa pengorbanan-pengorbanan pangkat, kedudukan, dan harta benda.

7. Karena imperialisme Barat merupakan kekuasaan internasional jang sangat besar, maka perdjuangan menghantjurkan imperialisme Barat memerlukan penghimpunan segala kekuatan anti-imperialisme. Bangsa-Bangsa Asia seluruhnja mendjadi mangsa dari imperialisme Barat. Oleh sebab itu perlu dibangunkan **persatuan Bangsa Asia** untuk setjara bersama-sama **menghantjurkan imperialisme.**

8. Disadari bahwa imperialisme Barat adalah kelandjutan dari kapitalisme modern jang menggali keuntungan2 besar dari bangsa2 lemah dan mendiami daerah2 jang kaja. **Perdjuangan melawan imperialisme Barat berarti djuga perdjuangan melawan kapitalisme internasional modern.** Sebab kapitalisme modern itulah jang membangkitkan semangat pendjadjahan dan membenarkan perkosaan hak hidup bangsa jg lemah. Oleh karena itu Rakjat Indonesia harus melawan kapitalisme dimanapun ia berada.

Istilah Marhaen dan Marhaenisme. Tidak lama setelah P.N.I. didirikan, diketemukanlah istilah 'Marhaen' jang mengilhami perdjuangan P.N.I. selandjutnja sebagai Partai Rakjat Indonesia.

Istilah ini berasal dari nama seorang petani jang tinggal didaerah Tjigereleng, perbatasan sebelah Selatan dari kota Bandung. Petani ketjil jang bernama Marhaen ini menggambarkan nasib rakjat ketjil jang menderita papa-sengsara akibat dari pendjadjahan ber-abad2 lamanja. Rakjat ketjil jang menderita sematjam itu meliputi djumlah tidak kurang dari 95 persen penduduk.

Marhaen ini mempunjai sebidang ketjil tanah jang dikerdjakan sendiri dengan peralatan sendiri jang sederhana. Ia adalah orang jang mempunjai tanah sendiri, mempunjai modal sendiri, dan berusaha sendiri. Orang ketjil sematjam Marhaen ini bukan sadja terdapat sebagai petani, melainkan djuga sebagai nelajan, sebagai pedagang, sebagai pengusaha keradjinan, sebagai pemborong, sebagai pendjual djasa dan sebagainja. Hidupnja serba sederhana, dan setiap saat diantjam oleh kekurangan dan kelaparan. Bersama-sama dengan golongan buruh mereka disebut Kaum Marhaen.

P.N.I. didirikan untuk membela dan memadjukan kepentingan Kaum Marhaen ini, untuk memimpin perdjuangan Kaum Marhaen menuntut keadilan dan kebenaran, untuk membangunkan kekuatan Kaum Marhaen guna menghadapi imperialisme dan kapitalisme jang telah memperkosa hak hidupnja.

Oleh sebab itu faham politik dan kemasjarakatan P.N.I. sedjak waktu itu disebut 'Marhaenisme'.

Dalam Kongres-nja jang ke-2 pada tanggal 18 s/d 20 Mei 1929 di Djakarta, diambil keputusan untuk menjelenggarakan kursus2 istimewa bagi kader2 P.N.I. dimana diadjarkan socialisme, anarchisme, komunisme dsb. Tudjuan penjelenggaraan kursus2 itu adalah untuk memberi pengetahuan dan pengertian jang djelas tentang nasionalisme dan demokrasi jang dianut oleh P.N.I. agar dipisahkan dari ideologie2 politik lainnja.

Setjara sadar P.N.I. menanamkan dan mengembangkan suatu faham politik chas Indonesia dari permulaan berdirinja. Itulah sebabnja maka ideologie Socio Nasionalisme dan Socio Demokrasi diberi nama Marhaenisme.

Program P.N.I.

Kongres Pertama dari PNI diadakan di Surabaja pada tanggal 27 s/d 30 Mei 1928. Didalam Kongres ini dirumuskan azas, tudjuan dan usaha P.N.I. dalam

anggaran dasarnja. Dalam anggaran dasar ditapkan bahwa tudjuan P.N.I. adalah **berdjuang mentjapai kemerdekaan kekuatan sendiri** dan kebiasaan sendiri serta bekerdja sama dengan atau menjokong lain2 perhimpunan jang sama maksudnja.

Program P.N.I. diwaktu itu menjimpulkan hal berikut :

Dibidang politik :

a. Memperkuat rasa kebangsaan pada umumnja, dan chususnja kesadaran atas persatuan Bangsa Indonesia.

b. Meniadakan segala rintangan bagi kemerdekaan bergerak dan rintangan bagi kehidupan politik seperti hak2 luar biasa dari Gubernur Djendral untuk membuang dan mengasingkan dsb.

Dibidang ekonomi :

Memadjukan penghidupan jang merdeka, memadjukan koperasi, keradjinan, bank2 dan perdagangan kebangsaan.

Dibidang kebudajaan dan sosial :

Memadjukan pendidikan dan pengadjaran kebangsaan ; memperbaiki kedudukan kaum wanita dengan memberantas poligami, per-

kawinan anak2 ; mendirikan serikat sekerdja dan membantunja ; memberantas pengangguran, membantu transmigrasi, memadjukan kesehatan rakjat ; memerangi penghisapan madat dan peminuman alkohol.

Hasil2 njata jang ditjapai P.N.I. Hasil pertama jg ditjapai oleh P.N.I. didalam usahanja menjatu-padukan kekuatan Rakjat adalah pembentukan Permupakatan Perhimpunan2 Politik Kebangsaan Indonesia (P.P.P.K.I.) pada tanggal 17 Desember 1927 jang terdiri atas P.N.I., Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Serikat Sumatra, Kaum Betawi, Algemene Studie club dan Indonesische Studieclub. Tudjuan dari organisasi ini adalah memelihara saling pengertian dan kerdja sama serta menjatukan arah gerakan kemerdekaan. Disamping itu dengan segera pula dapat dibentuk perkumpulan2 koperasi dan organisasi buruh seperti Persatuan Motoris Indonesia di Bandung, Serikat Anak Kapal Indonesia di Priok, Persatuan Djongos Indonesia di Surabaja, dsb.

Hasil jang paling berarti jang ditjapai oleh P.N.I. adalah berkobarnja tjita2 kemerdekaan dikalangan Rakjat setjara menjeluruh. Tjita2 kemerdekaan jang menjala-njala dan kesadaran

kawinan anak2 ; mendirikan serikat sekerdja dan membantunja ; memberantas pengangguran, membantu transmigrasi, memadjukan kesehatan rakjat ; memerangi penghisapan madat dan peminuman alkohol.

Hasil2 njata jang ditjapai P.N.I. Hasil pertama jg ditjapai oleh P.N.I. didalam usahanja menjatu-padukan kekuatan Rakjat adalah pembentukan Permupakatan Perhimpunan2 Politik Kebangsaan Indonesia (P.P.P.K.I.) pada tanggal 17 Desember 1927 jang terdiri atas P.N.I., Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Serikat Sumatra, Kaum Betawi, Algemene Studie club dan Indonesische Studieclub. Tudjuan dari organisasi ini adalah memelihara saling pengertian dan kerdja sama serta menjatukan arah gerakan kemerdekaan. Disamping itu dengan segera pula dapat dibentuk perkumpulan2 koperasi dan organisasi buruh seperti Persatuan Motoris Indonesia di Bandung, Serikat Anak Kapal Indonesia di Priok, Persatuan Djongos Indonesia di Surabaja, dsb.

Hasil jang paling berarti jang ditjapai oleh P.N.I. adalah **berkobarnja tjita2 kemerdekaan dikalangan Rakjat setjara menjeluruh.** Tjita2 kemerdekaan jang menjala-njala dan kesadaran

akan persatuan Bangsa Indonesia mendorong penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Merah Putih sebagai bendera kebangsaan, dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Timbullah alam pikiran baru dan alam tjita2 baru dikalangan Rakjat Indonesia.

Pengorbanan semangat kebangsaan dari Rakjat Indonesia ini sangat mengedjutkan dan mengchawatirkan bagi Pemerintah Djadjahan. Dengan dalih bahwa P.N.I. mempersiapkan pemberontakan atau sedikit-dikitnja menghasut Rakjat untuk menentang Pemerintah jang sah, maka pada tgl. 29 Desember 1929 dilakukan penggeledahan terhadap semua kantor P.N.I. dan rumah pemimpin-pemimpinnja. Ketua dan beberapa pemimpin lainnja ditangkap dan diadjukan kepengadilan pada tanggal 18 Agustus 1930. Keputusan Landraad (pengadilan) di Bandung menghukum berturut-turut Ir. Soekarno 4 tahun pendjara, Maskun 2 tahun pendjara, Supriadinata 1 tahun 8 bulan pendjara dan Gatot Mangkupradja 1 tahun 3 bulan pendjara. Keputusan ini dikuatkan Raad van Justitie (pengadilan bandingan) tanggal 17 April 1931. Alasan pengadilan untuk menghukum adalah karena mereka dianggap sudah ikut dalam perkumpulan jang bertudjuan melakukan kedjahatan dan sudah menghasut. Dengan ada-

nja keputusan pengadilan demikian maka P.N.I sudah dianggap sebagai organisasi kedjahatan dan oleh karenanja terlarang menurut hukum. Itulah sebabnja P.N.I. dinjatakan bubar oleh pengurusnja sedjak tanggal 17 April 1931.

Didalam waktu hanja dua setengah tahun (4. Djuli 1927 sampai 29 Desember 1929) P.N.I. telah dapat membangkitkan perasaan kebangsaan jang sedjak lama terpendam. Kehadiran P.N.I. dengan Marhaenismenja sangat tjotjok dengan perasaan dan memenuhi selera Rakjat. Memang P.N.I. dan Marhaenisme mentjerminkan perasaan, tjita2 dan tuntutan Rakjat, **P.N.I. dan Marhaenisme adalah pendjelmaan dari** djiwa Rakjat Indonesia. Djadi P.N.I. benar2 Partai Rakjat dan Marhaenisme benar2 ideologie Rakjat.

PNI dizaman kemerdekaan. Setelah kurang lebih 15 tahun P.N.I. tidak dapat turut serta memimpin perdjuangan Rakjat ,maka pada bulan Pebruari tahun 1946 dikota Kediri diproklamirkanlah berdirinja kembali P.N.I. sebagai kelandjutan dari P.N.I. tahun 1927. Azas P.N.I. dirumuskan diwaktu itu sebagai Socio-Nasional-Demokrasi jang dimaksudkan mentjakup pengertian Socio Nasionalisme dan Socio Demokrasi. Kemudian dalam Kongres di Surabaja tahun 1952 ditetapkan Marhaenisme sebagai azas P.N.I. jang

artinja tetap sama jaitu Socio-Nasionalisme dan Socio-Demokrasi.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sudah banjak jang ditjapai oleh Bangsa Indonesia. Kini Negara Kesatuan kepunjaan Bangsa Indonesia jang merdeka telah mendjadi kenjataan. Pantjasila telah mendjadi ideologie resmi dari Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Bangsa Indonesia telah memiliki modal jg sangat vital untuk membangun masjarakat jang ditjita-tjitakannja.

Tugas P.N.I. sebagai alat perdjuangan Rakjat didalam kemerdekaan adalah merealisasikan tjita2 Rakjat. P.N.I. bersama-sama Rakjat berdjuang sekuat tenaga untuk memenuhi ikrar Proklamasi Kemerdekaan. Program dan konsepsi P.N.I. tidak lain dari pada dengan menjatukan diri dengan Rakjat melaksanakan Pantjasila dan Undang-undang Dasar 1945 setjara konsekwen dan segera. P.N.I. tetap mentjerminkan isi hati nurani dan perdjuangan Rakjat Indonesia.